

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL
(Studi Analisis Pengembangan Pendidikan Multikultural di UIN Jakarta dan
STAIN Manado)



PENELITI

Dr. Muhammad Idris, M.Ag (Ketua)
Dr. Evra Willya (Anggota)
Ikmal, M.Pd.I (Anggota)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) MANADO
2014

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لوهاب العظيمة والصلاة على خير البرية وعلى اله ذوى النفوس الزكية , اما بعد.

Tiada kata yang patut dipanjatkan, selain puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. mengiringi rasa haru atas anugerah terindah yang dikaruniakan-Nya sepanjang upaya penulisan penelitian ini hingga tuntas sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Baginda Pembawa Kebenaran, Nabi Besar Muhammad SAW., keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikut ajarannya.

Peneliti menyadari dan meyakini sepenuhnya, bahwa penyelesaian karya ini dapat terwujud berkat pertolongan dan petunjuk Allah SWT., juga atas bantuan dan keterlibatan banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak, telah membantu peneliti dalam penyelesaian amanah ini.

Dengan hati yang tulus, peneliti menghaturkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibu Ketua STAIN Sekolah Tinggi Agama Islam telah dapat mengarahkan dan memberi kebijakan sehingga dapat membantu peneliti yang kemudian dikemas menjadi karya berharga.

Terimakasih yang sebesar-besarnya, peneliti sampaikan kepada Ketua dan Sekretaris P3M yang telah memfasilitasi penelitian ini agar dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang disediakan.

Ungkapan penghargaan yang tinggi, peneliti sampaikan kepada Dekan FITK UIN Jakarta dan ketua Jurusan /Prodi PAI FITK UIN Jakarta dan Ketua Jurusan Sekretaris, dan

staff Jurusan Tarbiyah STAIN Manado yang telah banyak memberikan data dan informasi yang peneliti butuhkan.

Kepada semua pihak yang tidak disebutkan di sini, peneliti mohon maaf atas segala kekhilafan dan perilaku yang kurang baik selama ini, budi baik selalu dikenang, namun sulit untuk dapat terbalas. Mohon maaf untuk segala alpa dan kesalahan. Semoga Allah meridhai kita semua. Amin.

Karya ini penuh dengan ketidaksempurnaan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan peneliti. Untuk itu kritik dan saran peneliti harapkan, dan adanya ketidaksempurnaan menjadi tanggung jawab peneliti. Harapan atas karya ini semoga dapat berguna dan bermanfaat untuk menambah wacana, wawasan, dan pengembangan masalah selanjutnya. Terimakasih.

Manado, Desember 2014

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori	10
E. Rincian Anggaran Penelitian	12
BAB II MULTIKULTURALISME SEBAGAI MASALAH PENDIDIKAN	13
A. Dari Pluralisme Agama ke Multikulturalisme	15
B. Pendidikan Multikultural	31
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian	42
C. Teknik Pengumpulan Data	42
D. Metode Analisis Data	43
E. Tahap - Tahap Penelitian	44
F. Uji Keabsahan Data	45

BAB IV	PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL	46
	A. FITK UIN Jakarta	46
	B. STAIN Manado	58
	C. Implementasi Pendidikan Multikultural	72
	C.1. Pendidikan Multikultural dalam Kurikulum Prodi PAI FITK UIN Jakarta	79
	C.2. Pendidikan Multikultural dalam Kurikulum Prodi PAI FITK UIN Jakarta	83
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	94
	B. Rekomendasi	94
DAFTAR PUSTAKA		97

ABSTRAK

Model Pendidikan agama yang selama ini dijalankan, faktanya sering menimbulkan fanatisme keberagamaan dan penciptaan idiologi klaim kebenaran. Karena praktek pendidikan agama kurang menyentuh aspek realitas sosial, yang sebenarnya juga merupakan garapan agama. Model pendidikan agama gaya lama yang cenderung eksklusif, dogmatis, kembali ke masa lalu yang kelabu, dan tidak menyentuh aspek moralitas, perlu didekonstruksi atau dibongkar. Kemudian dimunculkan model pendidikan yang menghargai kemanusiaan, membebaskan dari penindasan, memupuk persaudaraan dan menekankan kebaikan serta kesejahteraan bersama.

Model Pendidikan yang cocok untuk Indonesia masa depan tentu saja harus digali dari aspek sosiologis, antropologis, dan teologis masyarakatnya. Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang unik; merupakan kumpulan dari berbagai macam suku dan pemeluk agama yang berlainan satu dengan yang lainnya. Maka keanekaragaman kultural dan religius harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna saling membantu, berlomba membuat kebajikan, dan menciptakan kebaikan serta harmoni kehidupan.

Pembentukan masyarakat multikultural Indonesia yang sehat tidak bisa secara *taken for granted* atau *trial and error*, sebaliknya harus diupayakan secara *sistematis*, *programatis*, *integrated*, dan berkesinambungan. Salah satu langkah yang paling strategis dalam hal ini adalah melalui pendidikan multikultural yang diselenggarakan oleh lembaga perguruan tinggi, baik formal maupun non formal dan bahkan informal dalam masyarakat luas.

Saat ini pendidikan multikultural amat signifikan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. Pendidikan multikultural adalah model pendidikan yang diharapkan memberikan sumbangsih terhadap penciptaan perdamaian dan upaya menanggulangi konflik yang akhir-akhir ini marak terjadi. Sebab nilai dasar dari pendidikan ini adalah penanaman dan pembumian nilai toleransi, empati, simpati, solidaritas sosial, menghargai keragaman dan perbedaan pendapat dan sikap-sikap lain yang menjunjung kemanusiaan.

Pengembangan multikultural menjadi kebutuhan bangsa Indonesia yang majemuk dan beraneka ragam serta menjadi sebuah keniscayaan wahana desimenasi pemahaman multikulturalisme melalui jargon pendidikan multikultural. Hal inilah yang dilakukan oleh UIN Jakarta dalam mengembangkan pendidikan multikultural. Sebagai buktinya UIN Jakarta memperoleh perhatian dan apresiasi dari beberapa peneliti asing. Misalnya terdapat mahasiswa jurusan *international Relations dan Shoutheast Asian Student* dari George Washington University yang ingin mendalami pluralisme Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara dengan memilih UIN Jakarta sebagai host

Pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal STAIN Manado merupakan suatu hal yang harus dan mesti dilakukan, mengingat STAIN Manado berada di wilayah Sulawesi Utara. Sulawesi Utara merupakan kota beragama/“Tuhan” yang tumbuh dan berkembang berbagai agama, suku dan budaya sehingga kota Manado dikenal sebagai kota majemuk. Umat beragama hidup rukun dan saling menyapa dalam membangun tatanan kehidupan sosial yang nyaman dan teratur. Keanekaragaman suku, bahasa, adat istiadat dan agama tersebut merupakan suatu kenyataan yang patut disyukuri sebagai investasi bangsa. Namun di samping itu kemajemukan atau keanekaragaman juga dapat berpotensi untuk konflik kepentingan antara kelompok yang berbeda-beda tersebut

Berdasarkan paparan tersebut, maka diperlukan adanya kajian yang lebih komprehensif dan mendalam tentang pendidikan multikultural ini yang dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut: ***Bagaimana konsep pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal di UIN Jakarta Dan STAIN Manado?***

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif fenomenologis, dengan pendekatan empirik. Metode yang digunakan adalah observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa konsep pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal pada prodi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta dan Prodi PAI pada Jurusan Tarbiyah STAIN Manado adalah terintegrasi pada mata kuliah-mata kuliah, tidak diberikan dalam satu mata kuliah yang terpisah. Kurikulum pada ke dua perguruan tinggi ini memasukkan pendidikan multikultural pada kurikulum yang berorientasi kepada materi yang tujuan utamanya adalah memasukkan materi pendidikan multikultural pada setiap mata kuliah yang relevan.

Pendidikan multikultural yang harus banyak mendapat porsi di setiap mata kuliah yang relevan adalah agama. Agama merupakan isu yang paling sensitif dalam wacana dan gerakan multikulturalisme di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar problem multikulturalisme di Indonesia pada isu agama.

Pengembangan pendidikan multikultural dalam kurikulum haruslah mempertimbangkan kearifan lokal. Untuk Indonesia pendidikan multikultural memerlukan pedagogik baru. Untuk menerapkan konsep multikultural dalam masyarakat pluralistik, pedagogik yang tradisional tidak dapat digunakan lagi, karena pedagogik tradisional membatasi proses pendidikan di dalam ruangan sekolah yang sarat dengan pendidikan intelektualistik. Sedangkan kehidupan sosial budaya di Indonesia menuntut pendidikan hati yang diarahkan kepada rasa persatuan dari bangsa Indonesia yang pluralistik. Pedagogik baru yang dibutuhkan adalah pedagogik pemberdayaan dan pedagogik kesetaraan sesama manusia dalam kebudayaan yang beragam sehingga diharapkan mahasiswa agar bisa selalu berperilaku humanis, pluralis dan demokratis.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pendidikan -termasuk lembaga pendidikan Islam- sampai saat ini dianggap masih belum mempunyai kekuatan yang berarti jika dibanding dengan kekuatan-kekuatan lain, seperti kekuatan bisnis dan politik. Disinyalir, bahwa pusat-pusat kebudayaan sekarang ini bukan berada di dunia akademik, melainkan di dunia bisnis dan politik. Dalam setting seperti ini lembaga pendidikan Islam terancam subordinasi. Padahal Indonesia dikenal sebagai negara yang menempati posisi terbesar jumlah penduduk muslimnya. Tetapi potensi mayoritas muslim tersebut belum menjamin peran sosialnya. Hal ini tentu terkait dengan soal fungsi dan sasarannya pendidikan yang dikembangkan, dan model pendidikan Islam yang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini.¹

Perguruan tinggi sebagai wadah pendidikan dan pelayanan masyarakat pada level tinggi dan wadah potensial bagi munculnya sumberdaya manusia, seharusnya mampu mengantisipasi persoalan-persoalan dan tantangan global dunia saat ini, karena pendidikan berperan sebagai pengemban IPTEK, ia juga harus mampu mendidik manusia untuk mengemban seluruh bakat dan potensi sesuai dengan harkat dan martabatnya, agar terbina warganegara yang cerdas dan sabar. Di samping itu pendidikan juga harus berperan sebagai kritik sosial yang bertanggung jawab, memelihara dan mengembangkan kebudayaannya serta meningkatkan pengetahuan tentang bangsa dan budaya lain. Dengan demikian

¹ M. Zainuddin, (ed), *Memadu Sains dan Agama Menuju Universitas Islam Masa Depan*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2004), h. v. Banyak kalangan masyarakat kita masih skeptis dengan masa depan pendidikan Indonesia. Skeptisme ini banyak terkait dengan kenyataan pendidikan Indonesia yang kelihatan tidak berkarakter. Karena pendidikannya sendiri tidak berkarakter, tidak heran kalau Pendidikan Indonesia tidak atau belum bisa melahirkan anak didik yang berkarakter pula. Kenyataan bahwa Pendidikan Indonesia belum memiliki karakter yang mapan misalnya terlihat dari carut-marutnya kurikulum. Pameo “setiap ada Mendikbud baru, setiap itu pula kurikulum berubah” nampaknya memiliki dasar yang kuat. Kurikulum 2013 yang secara substantif membingungkan para ahli dan pengamat pendidikan, dan juga guru-guru yang diharapkan atau tepatnya dipaksa untuk melaksanakan kurikulum tersebut. Lihat Azyumardi Azra, *Pendidikan Indonesia Berkarakter: Kurikulum, UN, dan Hak Anak*, Makalah disampaikan pada Kuliah Umum STAIN Manado Tanggal 13 Mei 2013

setiap pengelola pendidikan, idealnya memiliki gambaran atau cita-cita mengenai masyarakat idaman. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap pengelola pendidikan seharusnya mampu menilai perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, dan dari hasil penilaian itulah kemudian dijadikan *frame of work* bagi pengembangan pendidikan dan gambaran ideal manusia yang diharapkan.²

Survival of the nation depends on educated peoples Keberlangsungan suatu bangsa tergantung kepada warganya yang terdidik. Pendidikan bukan sekedar mengajarkan atau mentransfer ilmu pengetahuan,³ atau semata mengembangkan aspek intelektual, melainkan juga untuk mengembangkan karakter, moral, nilai-nilai dan budaya peserta didik. Dengan kata lain pendidikan adalah membangun budaya, membangun peradaban, membangun masa depan bangsa. Karena itu untuk meningkatkan harkat dan martabat sebuah bangsa pada era global ini, tidak ada jalan lain kecuali dengan meningkatkan kualitas pendidikan.⁴

Pendidikan bukanlah semata-mata berfungsi sebagai alat penyalur ilmu pengetahuan, melainkan juga sebagai pendorong berkembangnya nilai-nilai luhur yang menjadi dasar berkembangnya watak / karakter yang baik. Watak yang baik

² M. Zainuddin, (ed), *Memadu Sains dan Agama Menuju Universitas Islam Masa Depan*, h. v-vi. Di era global yang serba kompleks dan *chaos* ini sarat dengan berbagai perubahan yang terus menerus dari waktu ke waktu, perlu disikapi dengan serius. Jika hal tersebut diabaikan, maka kita akan jauh tertinggal dan tergilas oleh sang waktu. Untuk menghindari hal tersebut sebuah organisasi/lembaga termasuk lembaga pendidikan Islam harus bisa menjadi lembaga pendidikan yang unggul. Sobri Sutikno, *Manajemen Pendidikan Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga Pendidikan Yang Unggul (Tinjauan Umum dan Islami)*, (Lombok: Holistica, 2012), h. v

³ Pendidikan seringkali hanya menjadi kegiatan menabung. Para murid menjadi celengan dan guru menjadi penabungnya. Dan yang terjadi bukanlah proses komunikasi, akan tetapi guru menyampaikan pernyataan-pernyataan dan mengisi tabungan yang diterima dan dituangkan dengan patuh oleh muridnya. Lihat Paulo friere, *Pendidikan Kaum Tertindas*, (Jakarta: LP3ES, 1991), h. 26

⁴ Dodi Nandika, *Pendidikan di Indonesia di Tengah Gelombang Perubahan*, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2007), h. 15. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan maka akan tercipta kesatuan utuh dalam rencana dan gerak langkah pembangunan bangsa di masa depan, sebab kualitas pendidikan sangat menentukan sumber daya manusia suatu bangsa. Kualitas pendidikan mesti bersandar pada segenap aspek yang terdapat dalam diri manusia atau warganegara. Lihat Dodi Nandika, *Pendidikan di Indonesia di Tengah Gelombang Perubahan*, h. 15

itu antara lain berupa sikap jujur, adil, demokratis, disiplin, dan toleran.⁵ Watak toleran adalah salah satu di antara watak yang harus dikembangkan di lembaga pendidikan. Pengembangan watak toleran semakin penting dirasakan mengingat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang sarat dengan keragaman etnik, ras, agama, dan identitas kedaerahan. Dalam era globalisasi ini, tiap individu dan kelompok tak jarang harus bertarung untuk memperebutkan pengakuan identitas (baik politik maupun budaya) serta sumber-sumber ekonomi yang semakin langka. Dengan iklim demokrasi yang semakin berkembang, telah tumbuh kesadaran bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengembangkan kemampuannya. Akibatnya, konflikpun sering tidak terelakkan. Untuk mengatasi situasi ini, proses komunikasi yang baik jelas diperlukan dan sikap toleran terhadap perbedaan menjadi penting.⁶

Menafikan keberadaan tradisi-tradisi agama di muka bumi, baik di Barat apalagi di Timur, merupakan pekerjaan yang sia-sia. Masing-masing mempunyai hak hidup yang sama, masing-masing mempunyai cara untuk mempertahankan tradisi dan identitasnya sendiri-sendiri dengan berbagai cara yang bisa dilakukan. Cara yang paling tepat adalah melalui jalur pendidikan, karena ia merupakan alat yang paling efektif untuk meneruskan, melanggengkan, mengawetkan dan mengonservasi tradisi dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Permasalahan pokok yang dihadapi para pendidik dan penggerak sosial keagamaan pada era kemajemukan dan era multikultural adalah bagaimana agar masing-masing tradisi keagamaan tetap dapat mengawetkan, memelihara, melanggengkan, mengalihgenerasikan serta mewariskan kepercayaan dan tradisi yang diyakini sebagai suatu kebenaran yang mutlak, namun pada saat yang sama juga menyadari sepenuhnya keberadaan kelompok tradisi keagamaan lain yang juga berbuat serupa. Selain memperkuat identitas diri dan kelompoknya, upaya

⁵ Sulistyowati Irianto, (ed), *Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h. 53-54

⁶ Sulistyowati Irianto, (ed), *Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan*, h. 56

apa yang dilakukan para pendidik sosial keagamaan dalam masing-masing tradisi untuk juga menjaga kebersamaan, kohesi sosial dan keutuhan bersama. Jika disadari perlunya hal tersebut, lalu akan muncul implikasi dan konsekwensi dari cara, metode, pilihan materi, serta teknik pendidikan dan pengajaran agama yang disajikan kepada masyarakat yang plural, majemuk-terbuka seperti sekarang ini.⁷

Model Pendidikan agama yang selama ini dijalankan, faktanya sering menimbulkan fanatisme keberagamaan dan penciptaan idiologi klaim kebenaran.⁸ Karena praktek pendidikan agama kurang menyentuh aspek realitas sosial, yang sebenarnya juga merupakan garapan agama. Model pendidikan agama gaya lama yang cenderung eksklusif, dogmatis, kembali ke masa lalu yang kelabu, dan tidak menyentuh aspek moralitas, perlu didekonstruksi atau dibongkar. Kemudian dimunculkan model pendidikan yang menghargai kemanusiaan, membebaskan dari penindasan, memupuk persaudaraan dan menekankan kebaikan serta kesejahteraan bersama.⁹

Pendidikan agama di sekolah kurang menumbuhkan kesadaran positif akan realitas plural kehidupan agama masyarakat, baik secara internal dalam kehidupan agama itu sendiri maupun secara eksternal dalam kaitannya dengan agama-agama lain. Oleh karena itu tidak jarang pendidikan agama masih saja diajarkan sebagai bagian dari upaya seseorang untuk memonopoli Tuhan dan Kebenaran. Akibatnya, realitas plural kehidupan agama belum bisa membuahkan kearifan hidup dalam semangat dialog dan kurang berfungsi sebagai tali perekat persatuan bangsa. Ia justru bagaikan “api dalam sekam” yang setiap saat dapat

⁷ M. Amin Abdullah, *Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius*, (Jakarta: PSAP, 2005), h. 2-3

⁸ Pendidikan agama yang seharusnya dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengembangkan moralitas universal yang ada dalam agama-agama sekaligus mengembangkan teologi inklusif dan pluralis, selama ini cenderung malah menampilkan wajahnya yang eksklusif dan dogmatif. Akibatnya cita-cita luhur untuk mencapai masyarakat majemuk yang harmonis, dimana perbedaan dan keanekaragaman budaya mampu berfungsi sebagai sumber daya yang memperkaya pemekaran manusia dan peradaban, hingga kini masih menjadi impian. Lihat Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2005), h. 89

⁹ Ahmad Fuadi Fanani, *Islam Mazhab Kritis Menggagas Keberagamaan Liberatif*, (Jakarta: Kompas, 2004), h. 17

meledak dan membuat carut-marutnya keharmonisan dan kerukunan hidup berbangsa karena pluralitas agama seringkali memicu terjadinya beragam konflik dan tindak kekerasan yang seakan tiada pernah habis-habisnya.¹⁰

Model Pendidikan yang cocok untuk Indonesia masa depan tentu saja harus digali dari aspek sosiologis, antropologis, dan teologis masyarakatnya. Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang unik; merupakan kumpulan dari berbagai macam suku dan pemeluk agama yang berlainan satu dengan yang lainnya. Maka keanekaragaman kultural dan religius harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna saling membantu, berlomba membuat kebajikan, dan menciptakan kebaikan serta harmoni kehidupan.

Pembentukan masyarakat multikultural Indonesia yang sehat tidak bisa secara *taken for granted* atau *trial and error*, sebaliknya harus diupayakan secara *sistematis, programatis, integrated*, dan berkesinambungan. Salah satu langkah yang paling strategis dalam hal ini adalah melalui pendidikan multikultural yang diselenggarakan oleh lembaga perguruan tinggi, baik formal maupun non formal dan bahkan informal dalam masyarakat luas.¹¹

Saat ini pendidikan multikultural amat signifikan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. Pendidikan multikultural adalah model pendidikan yang diharapkan memberikan sumbangsih terhadap penciptaan perdamaian dan upaya menanggulangi konflik yang akhir-akhir ini marak terjadi. Sebab nilai dasar dari pendidikan ini adalah penanaman dan pembumihian nilai toleransi, empati, simpati, solidaritas sosial, menghargai keragaman dan perbedaan pendapat dan sikap-sikap lain yang menjunjung kemanusiaan.

Dalam pendidikan multikultural, diskriminasi adalah permasalahan utama yang menjadi latar belakang pentingnya penerapan strategi pendidikan tersebut. Diharapkan dengan menerapkan strategi pendidikan ini, maka generasi yang akan datang akan menjadi generasi yang selalu menjunjung tinggi keadilan, demokrasi

¹⁰ Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif*, (Yogyakarta: Lkis, 2008), h. 215

¹¹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Agama : Membangun Multikulturalisme Indonesia*, Kata Pengantar dalam Zakiyuddin Baidhawi, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2005), h. vii

dan humanisme.¹² Fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok sosial, kultural dominan atau *mainstream*, dan agama. Fokus seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya *mainstream* yang dominan, yang pada akhirnya dapat membuat orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat *mainstream*. Pendidikan interkultural seperti ini pada akhirnya memunculkan tidak hanya sikap tidak peduli terhadap nilai-nilai budaya minoritas, tetapi bahkan cenderung melestarikan prasangka-prasangka sosial dan kultural yang rasis dan diskriminatif. Dan dari kerangka inilah, maka pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap peduli dan mau mengerti, dan politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas.¹³

Dalam konteks ini pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar sikap *indifference* dan *nonrecognition* berakar tidak hanya dari ketimpangan struktural rasial, paradigma pendidikan multikultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang; sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Paradigma seperti ini pada gilirannya mendorong tumbuhnya kajian-kajian tentang *ethnic studies*, untuk kemudian menemukan tempatnya di dalam kurikulum pendidikan sejak dari tingkat dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi.¹⁴

Pertimbangan-pertimbangan itulah yang perlu dikaji dan direnungkan ulang bagi subjek pendidikan di Indonesia salah satunya dengan mengembangkan pendidikan multikultural, yaitu pendidikan yang mampu mengakomodir sekian ribu perbedaan dalam sebuah wadah yang harmonis, toleran, dan saling

¹² M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural Cross-Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), h. 23

¹³ Azyumardi Azra, *Pendidikan Agama : Membangun Multikulturalisme Indonesia*, Kata Pengantar dalam Zakiyuddin Baidhawi, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, h. ix

¹⁴ Azyumardi Azra, *Pendidikan Agama : Membangun Multikulturalisme Indonesia*, Kata Pengantar dalam Zakiyuddin Baidhawi, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, h. ix

menghargai. Inilah yang diharapkan menjadi salah satu pilar kedamaian, kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat Indonesia.

Dengan pembelajaran multikultural para lulusan akan dapat memiliki sikap kemandirian dalam menyadari dan menyelesaikan segala problem kehidupan. Melalui berbagai macam cara dan strategi pendidikan serta mengimplementasikannya yang mempunyai visi dan misi yang selalu menegakkan dan menghargai pluralisme, demokrasi dan humanisme. Diharapkan para generasi penerus menjadi generasi multikultural yang menghargai perbedaan, selalu menegakkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan yang akan datang.

Pengembangan multikultural menjadi kebutuhan bangsa Indonesia yang majemuk dan beraneka ragam serta menjadi sebuah keniscayaan wahana desimenasi pemahaman multikulturalisme melalui jargon pendidikan multikultural. Hal inilah yang dilakukan oleh UIN Jakarta dalam mengembangkan pendidikan multikultural. Sebagai buktinya UIN Jakarta memperoleh perhatian dan apresiasi dari beberapa peneliti asing. Misalnya terdapat mahasiswa jurusan *international Relations dan Shoutheast Asian Student* dari George Washington University yang ingin mendalami pluralisme Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara dengan memilih UIN Jakarta sebagai host.¹⁵

Pengembangan bidang keilmuan di UIN Jakarta serta semakin luasnya jaringan kelembagaan di tingkat internasional telah mendorong UIN Jakarta untuk merubah logonya pada tanggal 21 Agustus 2008. Logo ini memiliki 7 ciri khas: 1) Kubah dan/bayangan dunia, 2) gerak rotasi Atom, 3) bunga lotus, 4) buku, 5) garis putih pada frase UIN Jakarta, 6) warna biru, 7) warna kuning. Logo ini tidak mengubah semangat keislaman yang ada pada logo sebelumnya, melainkan untuk memperluas visi dan misi yang diemban oleh UIN yang tetap berdasarkan nilai-nilai keislaman yang bersifat global dan universal yang diisyaratkan oleh bola dunia. Tanda kubah menunjukkan tradisi dan simbol peradaban Islam yang

¹⁵ Komaruddin Hidayat, *Membangun Tradisi Politik yang Berkeadaban*, Pidato Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Upacara Wisuda Sarjana Ke-73 Tahun Akademik 2008/2009, Sabtu 18 Oktober 2008 M/ 18 Syawal 1429 H.

diinspirasi oleh al-Qur'an. Garis lingkaran atom juga dapat dilihat sebagai bunga lotus (*sidrah*) yang bermakna puncak makrifat (*sidrah muntaha*) yang menjadi dambaan setiap *muttaqin*. Sedangkan warna biru adalah simbol kedalaman ilmu pengetahuan, kedamaian, dan kepulauan Indonesia.¹⁶

Pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal STAIN Manado merupakan suatu hal yang harus dan mesti dilakukan, mengingat STAIN Manado berada di wilayah Sulawesi Utara. Sulawesi Utara merupakan kota beragama/“Tuhan” yang tumbuh dan berkembang berbagai agama, suku dan budaya sehingga kota Manado dikenal sebagai kota majemuk. Umat beragama hidup rukun dan saling menyapa dalam membangun tatanan kehidupan sosial yang nyaman dan teratur. Keanekaragaman suku, bahasa, adat istiadat dan agama tersebut merupakan suatu kenyataan yang patut disyukuri sebagai investasi bangsa. Namun di samping itu kemajemukan atau keanekaragaman juga dapat berpotensi untuk konflik kepentingan antara kelompok yang berbeda-beda tersebut.

STAIN Manado sebagai lembaga pendidikan tinggi di Sulawesi Utara berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melaksanakan tridarma perguruan tinggi. Sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi, STAIN Manado sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam ditujukan antara lain untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian yang unggul, sehat, berilmu, cakap, mempunyai wawasan kebangsaan, menghargai pluralisme dan tidak tercerabut dari akar budaya Indonesia.¹⁷

Penelitian ini menjadi suatu hal yang penting karena hasil dari penelitian ini akan merumuskan konsep pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal

¹⁶ Komaruddin Hidayat, *Membangun Tradisi Politik yang Berkeadaban*, Pidato Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Upacara Wisuda Sarjana Ke-73 Tahun Akademik 2008/2009, Sabtu 18 Oktober 2008 M/ 18 Syawal 1429 H

¹⁷ Rencana Strategik STAIN Manado Tahun 2010-2014

UIN Jakarta sebagai barometer keilmuan di Indonesia dan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal STAIN Manado lebih-lebih lagi karena sekarang ini STAIN Manado sedang dalam proses alih status ke IAIN, dan spesifikasi yang dirumuskan dalam rangka alih status ini adalah perguruan tinggi multikultural.

UIN Jakarta sebagai jendela keilmuan keislaman dan tertua di Indonesia yang unik dan strategis.¹⁸ UIN Jakarta sebagai simbol kemajuan budaya dan perdaban bangsa Indonesia, khususnya di bidang agama, pendidikan dan sosial budaya. Alasan penulis membandingkan UIN Jakarta dan STAIN Manado karena sama-sama memiliki aneka kultur lokal yang khas yang layak diriset untuk menambah wawasan dan cakrawala berfikir dalam konteks keindonesiaan sebagai kontribusi keilmuan ke depan.

Untuk menganalisa pendidikan multikultural pada dua perguruan tinggi ini adalah kurikulum, silabus, dan buku ajar. Dalam perspektif pendidikan multikultural, buku ajar untuk mahasiswa harus memuat nilai-nilai demokrasi, pluralisme, kesetaraan, dan inklusivisme. Dalam hal kurikulum dan silabus, konsep pendidikan multikultural juga menuntut hal yang sama.

Dalam mengkaji komponen kurikulum, pertanyaan yang paling mendasar yang patut dikemukakan terlebih dahulu adalah apa dasar dan tujuan pendidikan multikultural di perguruan tinggi. Jawaban terhadap pertanyaan ini akan tercermin dari visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan, program lembaga, struktur kurikulum, dan program pembelajaran yang dirumuskan.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya adalah *Bagaimana konsep pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal di UIN Jakarta Dan STAIN Manado?*

Karena luasnya lokasi penelitian, maka penelitian ini dibatasi dengan konsep pendidikan multikultural berbasis lokal pada Prodi PAI Fakultas Ilmu

¹⁸ Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Jakarta, *Pedoman Akademik Program Strata Satu 2013/2014 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (Jakarta: UIN Jakarta, 2013), h. 8

Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta dan Prodi PAI Jurusan Tarbiyah STAIN Manado.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah : adalah untuk merumuskan konsep pendidikan multikultural yang berbasis kearifan lokal di Prodi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta dan Prodi PAI Jurusan Tarbiyah STAIN Manado.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah: rekomendasi strategis kepada pimpinan UIN Jakarta dan STAIN Manado khususnya terhadap rumusan konsep pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal dalam pengembangan pendidikan multikultural kedua perguruan tinggi ini.

D. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

1. Tinjauan Pustaka

Seperti dalam batasan masalah, penelitian ini menfokuskan kajian pada konsep pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta dan Jurusan Tarbiyah STAIN Manado.

Berdasarkan riset pendahuluan yang dilakukan, terdapat sejumlah penelitian dan buku yang memuat tentang pendidikan multikultural.

Ngainun Naim & Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, Jogjakarta : Ar-Ruz Media, 2008. Buku ini membahas dasar-dasar pendidikan pluralis beserta segala aspek teori dan kerangka operasionalnya.

M.Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural Cross-Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2007. Buku ini menjelaskan bahwa jalur pendidikan berbasis multikulturalisme dipandang cukup strategis untuk proses transformasi sosial.

Zakiyuddin Baidhawi, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2005. Buku ini berisi upaya untuk mencari sisi-sisi kebijakan multikultural yang dapat disajikan melalui pendidikan agama.

Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2005. Buku ini menjelaskan bahwa pendidikan pluralisme mengandaikan

kita untuk dapat membuka visi pada cakrawala luas, mampu melintas batas etnis atau tradisi budaya dan agama sehingga mampu melihat kemanusiaan sebagai sebuah keluarga yang memiliki perbedaan maupun kesamaan cita-cita.

Dewi Novalia Fajriah, *Basis Teologi Pendidikan Multikultural*, Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 3, No 2, Juli – Desember 2008. Tulisan ini menjelaskan bahwa pendidikan multikultural merupakan pendidikan tentang keragaman yang merespon perubahan masyarakat secara kultural.

2. Landasan Teori

Isu utama tentang multikulturalisme sesungguhnya bukan barang baru, Isu ini sudah mulai muncul pada empat dekade yang lalu. Demikian pula dengan gagasan pentingnya pendidikan multikultural. Gagasan ini bisa ditelusuri secara historis dari gerakan hak-haki sipil. Para penggagas gerakan ini secara keseluruhan bekerjasama dengan melibatkan sejumlah pendidik dan sarjana untuk menyediakan basis bagi kepemimpinan pendidikan multikultural.

Ada dua istilah penting yang berdekatan secara makna dan merupakan suatu perkembangan yang sinambung yakni pendidikan multietnik dan pendidikan multikultural. Pendidikan multietnik sering dipergunakan dunia pendidikan sebagai suatu usaha sistematis dan berjenjang dalam rangka menjembatani kelompok-kelompok rasial dan kelompok-kelompok etnik yang berbeda dan memiliki potensi untuk melahirkan ketegangan dan konflik. Sementara itu istilah pendidikan multikultural memperluas payung pendidikan sehingga memasukkan isu-isu lain seperti relasi gender, hubungan antar agama, kelompok kepentingan, kebudayaan dan subkultur serta bentuk-bentuk lain dari keragaman.¹⁹

Pendidikan multikultural adalah sebagai proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran (agama). Pengertian pendidikan multikultural yang demikian tentu mempunyai implikasi yang sangat luas dalam pendidikan. Karena pendidikan itu sendiri secara umum dipahami sebagai proses tanpa akhir atau proses sepanjang hayat. Dengan demikian

¹⁹ Zakiyuddin Baidhawi, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2005), h. 6-7

pendidikan multikultural menghendaki penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia dari manapun dia datang dan berbudaya apapun dia. Harapannya adalah terciptanya kedamaian sejati, keamanan yang tidak dihantui kecemasan, dan kebahagiaan tanpa rekayasa.²⁰

Istilah pendidikan multikultural dapat digunakan baik pada tingkatan deskriptif dan normatif, yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh ia juga mencakup pengertian tentang perimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan bagi peserta didik di dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriptif dan normatif ini, maka kurikulum pendidikan multikultural mestilah mencakup subyek-subyek semacam toleransi, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, HAM, demokrasi dan pluralitas, kemanusiaan universal, tema-tema tentang perbedaan etnokultural dan agama.²¹

E. Rincian Anggaran Penelitian

Biaya penelitian ini dibebankan kepada anggaran DIPA STAIN Manado tahun 2014 sebanyak Rp. 50.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:

1. Pembuatan Proposal	: Rp. 2.000.000
2. Pengadaan Referensi	: Rp. 10.000.000
3. Transportasi	: Rp. 12.250.000
4. Nara Sumber (4 Jam)	: Rp. 3.500.000
5. Penyusunan Laporan	: Rp. 3.000.000
6. Pengetikan	: Rp. 3.000.000
7. ATK	: Rp. 7.000.000
8. Konsumsi	: Rp. 2.000.000
9. Penggandaan Laporan	: <u>Rp. 7.250.000</u>
Jumlah	Rp. 50.000.000., (<i>Lima Puluh Juta</i>)

²⁰ Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 50-51

²¹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Agama : Membangun Multikulturalisme Indonesia*, Kata Pengantar dalam Zakiyuddin Baidhawi, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, h. Ix-x

BAB II

MULTIKULTURALISME SEBAGAI MASALAH PENDIDIKAN

Indonesia adalah suatu negara yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, suku dan agama sehingga Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat multikultural. Akan tetapi di lain pihak realitas multikultural tersebut berhadapan dengan kebutuhan mendesak untuk merekonstruksikan kembali kebudayaan nasional Indonesia yang dapat menjadi *integrating force* yang mengikat seluruh keragaman etnis dan budaya tersebut.

Dalam konteks kehidupan yang multikultural, pemahaman yang berdimensi multikultural harus dihadirkan untuk memperluas wacana pemikiran keagamaan manusia yang selama ini masih mempertahankan egoisme keagamaan dan kebudayaan. Havilan, sebagaimana yang dikutip oleh Ruslan Ibrahim mengatakan bahwa multikultural dapat diartikan pula sebagai pluralitas kebudayaan dan agama. Dengan demikian jika keagamaan itu sudah plural, maka manusia dituntut untuk memelihara pluralitas agar terjadi kehidupan yang ramah dan penuh perdamaian. Pluralitas kebudayaan adalah interaksi sosial dan politik antara orang-orang yang berbeda cara hidup dan berfikirnya dalam suatu masyarakat. Secara ideal pluralitas kebudayaan berarti penolakan terhadap kefanatikan, purbansangka, rasisme, tribalisme dan menerima secara inklusif keanekaragaman yang ada.²²

Sikap saling menerima, menghargai nilai, budaya, keyakinan yang berbeda tidak otomatis akan berkembang sendiri. Apalagi dalam diri seseorang ada kecenderungan untuk mengharap orang lain menjadi seperti dirinya. Sikap saling menerima dan saling menghargai akan cepat berkembang bila dilatihkan dan didikkan pada generasi muda dalam sistem pendidikan Nasional. Dengan pendidikan, sikap penghargaan terhadap perbedaan yang direncana baik, generasi muda dilatih dan disadarkan akan pentingnya penghargaan pada orang lain dan budaya lain bahkan melatihnya dalam hidup sehingga sewaktu mereka dewasa sudah mempunyai sikap itu. Jika cita ideal pendidikan seperti itu dapat terwujud

²² Ruslan Ibrahim, *Pendidika Multikultural : Upaya Meminimalisir Konflik dalam Era Pluralisme*, dalam *eL-Tarbawi Jurnal Pendidikan Islam*, No.1.Vol.I. 2008, h. 117

di hati sanubari dan perilaku masyarakat, maka itulah yang disebut dengan pendidikan yang multikultural yang bermuara pada multikulturalisme.²³

Pendidikan multikultural sejatinya merupakan pendidikan yang menjunjung tinggi persamaan hak dan martabat manusia. Berbagai bentuk tindakan diskriminasi yang didapatkan kelompok minoritas mendorong manusia untuk lebih gencar lagi melakukan tindakan perlawanan terhadap dominasi mayoritas, salah satunya melalui pendidikan. Karena pendidikan merupakan sarana yang tepat untuk mentransformasikan gagasan multukultural ini. Pendidikan tidak seharusnya menjadikan manusia teralienasi dari sosio kulturenya, karena pendidikan seharusnya menjadi proses yang disebut oleh Freire yaitu *concientizacao* atau konsientisasi. Konsientisasi yaitu proses penyadaran manusia, yang berarti manusia harus disadarkan dari realitas yang selama ini mengungkungnya.

Begitu pula dengan pendidikan multikultural yang seyogyanya mengeluarkan manusia dari faham-faham fanatis dan eksklusif, karena pendidikan multikultural merupakan pola pendidikan yang inklusif dan pendidikan merupakan proses humanisasi, yaitu memanusiaikan manusia. Memanusiaikan manusia berarti tidak memaksakan manusia menjadi manusia yang lain dan juga menghormati hak-hak manusia dalam kehidupan individu maupun sosialnya.

Sejarah panjang diskriminasi manusia mengantarkan pada satu titik kemunculan pendidikan multikultural. Alasan lain yang melatarbelakangi pendidikan multikultural adalah keberadaan masyarakat dengan individu-individu yang beragam latar belakang bahasa dan kebangsaan (*nationality*), suku (*race or ethnicity*), agama (*religion*), jender dan kelas sosial (*social class*). Keragaman latar belakang individu dalam masyarakat tersebut berimplikasi pada keragaman latar belakang peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan.²⁴

²³ Ruslan Ibrahim, Pendidikan Multikultural : Upaya Meminimalisir Konflik dalam Era Pluralisme, dalam *eL-Tarbawi Jurnal Pendidikan Islam*, No.1.Vol.I. 2008, h. 117-118

²⁴ Dewi Novalia Fajriah, Basis Teologis Pendidikan Multikultural, dalam *Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 3 No. 2, Juli – Desember 2008, h. 51

Berdasarkan hal di atas, maka pendidikan multikultural menjadi penting untuk membangun suatu kondisi yang kondusif bagi pembangunan bangsa. Pendidikan multikultural berperan meningkatkan mutu bangsa agar dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, sekaligus menjadi perekat berbagai perbedaan di antara komunitas masyarakat Indonesia yang memiliki latar kultural yang beragam untuk meningkatkan komitmennya dalam berbangsa dan bernegara.

A. Dari pluralisme Agama ke Multikulturalisme

1. Pluralitas, Pluralisme, dan Multikulturalisme

1.1. Pluralitas dan Pluralisme Agama

Pluralitas merupakan sunnatullah di alam ini. Ini dapat dilihat dalam kerangka kesatuan manusia, Allah menciptakan beragam suku bangsa. Dalam kerangka kesatuan sebuah bangsa, Allah menciptakan beragam suku dan kabilah. Dalam kerangka kesatuan sebuah bahasa, Allah menciptakan berbagai macam dialek. Tentunya masih banyak lagi sunnah pluralitas yang Allah tunjukkan di alam ini. Islam sebagai agama yang diturunkan Allah membawa rahmat bagi seluruh alam, menjelaskan apa yang dimaksud dengan sunnah pluralitas itu. Islam tidak memandang pluralitas sebagai sebuah perpecahan yang membawa kepada bencana. Islam memandang pluralitas sebagai wujud kemahakuasaan Allah atas ciptaan-Nya dan rahmat yang diturunkan Allah bagi makhluknya. Dengan pluralitas, kehidupan menjadi dinamis dan tidak stagnan karena terdapat kompetisi dari masing-masing elemen untuk berbuat yang terbaik. Hal ini membuat hidup tidak membosankan karena selalu ada pembaruan menuju kebaikan.

Pluralitas adalah kemajemukan yang didasari oleh keutamaan dan kekhasan. Karena itu pluralitas tidak dapat terwujud atau terbayangkan keberadaannya kecuali sebagai antitesis dan sebagai objek komparatif dari keseragaman dan kesatuan yang merangkul seluruh dimensinya. Pluralitas tidak dapat disematkan kepada “situasi cerai berai” dan “permusuhan” yang tidak mempunyai tali persatuan yang mengikat semua pihak. Tidak juga pada kondisi

“cerai berai” yang sama sekali tidak memiliki hubungan antar masing-masing pihak.²⁵

Oleh karena itu pluralitas agama adalah realitas yang tidak mungkin diingkari. Kontak-kontak antara komunitas yang berbeda agama semakin meningkat. Hampir tidak ada di belahan bumi sekarang ini kelompok-kelompok yang tidak pernah mempunyai kontak dengan kelompok lain yang berbeda agama. Jaringan komunikasi telah menembus tembok-tembok pemisah yang dahulunya mengisolasi kelompok-kelompok keagamaan dalam masyarakat. Pluralitas keagamaan sebagaimana pluralitas-pluralitas lain seperti pluralitas etnik, pluralitas kultural, dan pluralitas bahasa adalah semacam hukum alam yang tidak dapat diingkari.

Dalam hal pluralitas agama (*religious plurality*), Islam adalah agama yang kitab sucinya mengakui eksistensi agama-agama lain, di antaranya adalah surat al-Baqarah ayat 62. Pengakuan Allah terhadap eksistensi agama-agama dengan tidak membedakan kelompok, suku, dan bangsa sangat jelas. Dengan adanya penyebutan nama-nama agama pada ayat tersebut menunjukkan adanya pengakuan al-Qur'an terhadap pluralitas agama.

Pemahaman ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh MUI yang menyatakan bahwa pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.²⁶

Nurchalis Madjid menyatakan bahwa ajaran pluralitas agama itu menandakan pengertian dasar bahwa semua agama diberi kebebasan untuk hidup dengan resiko yang ditanggung oleh para pengikut agama itu masing-masing baik secara pribadi maupun secara kelompok.²⁷

²⁵ Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas: Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattanie, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 9

²⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/ MUNAS VII/ MUI/II/2005 dalam Keputusan, Bagian pertama: Ketentuan Umum

²⁷ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan*, (Jakarta: paramadina, 1992), h. 184

Universalitas al-Qur'an menunjukkan bahwa wahyu ini menerima pluralitas agama sebagai suatu keniscayaan sehingga kaum muslim harus menegosiasikan, mentransformasikan dan menekankan kesatuan fundamental umat manusia sebagai sama-sama berasal dan diciptakan oleh Tuhan.²⁸ Di samping itu al-Qur'an juga menegaskan bahwa keberagaman manusia itu tidak terelakkan bagi satu tradisi tertentu untuk menentukan kepercayaan umum, nilai, dan tradisi yang perlu bagi kehidupan manusia.²⁹

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa pluralitas agama dalam al-Qur'an didasarkan pada hubungan antara keimanan privat (pribadi) dan proyeksi publiknya dalam masyarakat. Berkenaan dengan keimanan privat, al-Qur'an bersikap nonintervensionis. Sedangkan berkenaan dengan proyeksi publik keimanan itu, sikap al-Qur'an didasarkan pada prinsip koeksistensi, yaitu kesediaan dari umat dominan untuk memberikan kebebasan bagi umat-umat beragama lain dengan aturan mereka sendiri dalam menjalankan urusan mereka dan untuk hidup berdampingan dengan kaum muslim.

Pluralitas agama menuntut adanya keterlibatan aktif dengan kaum agama lain, dalam arti bukan sekedar toleransi, melainkan memahami. Toleransi tidak memerlukan keterlibatan aktif dengan kaum lain. Toleransi tidak membantu meredakan sikap acuh tak acuh sesama umat beragama. Dalam dunia dimana perbedaan secara historis telah dimanipulasi untuk menghancurkan jembatan penghubung antarkomunitas. Pengetahuan dan pemahaman terhadap perbedaan agama hanya bisa dicapai jika kita mampu memasuki dialog terbuka satu sama lain, tanpa takut menghadapi ketidaksepakatan besar.

Satu hal yang perlu dibedakan di sini adalah istilah antara pluralisme dengan pluralitas. Kedua istilah ini bisa menimbulkan kesalahpahaman dalam pemakaiannya. Pluralitas agama sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dapat dipahami sebagai suatu pengakuan akan keberadaan agama-agama yang

²⁸ Abdulaziz Sachedina, *The Islam Roots of Democratic Pluralism*, (New York: Oxford University Press, 2001), h. 27

²⁹ Abdulaziz Sachedina, *The Islam Roots of Democratic Pluralism*, h. 27

berbeda dan beragam dengan seluruh karakteristik dan kekhususannya dan menerima keberbedaan itu dalam beragama dan berkeyakinan.

Sedangkan pluralisme secara terminologi berasal dari akar kata plural yang berarti bentuk jamak, banyak atau ganda,³⁰ atau paham yang meniscayakan adanya keragaman dan perbedaan.³¹ Definisi pluralisme seperti ini menurut penulis sama dengan pluralitas. Tetapi kemudian pluralisme ini dipahami sebagai upaya penyeragaman (*uniformity*) atau menyeragamkan segala perbedaan dan keberagaman agama.

Dalam the Oxford English Dictionary disebutkan, bahwa pluralisme dipahami sebagai: 1). Suatu teori yang menentang kekuasaan negara monolitik; dan sebaliknya mendukung desentralisasi dan otonomi untuk organisasi-organisasi utama yang mewakili keterlibatan individu dalam masyarakat. Juga suatu keyakinan bahwa kekuasaan itu harus dibagi bersama-sama di antara sejumlah partai politik. 2). Keberadaan atau toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat atau negara, serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam suatu badan, kelembagaan, dan sebagainya.³²

³⁰ Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 604

³¹ A. Syafi'i Mufid (ed), *Beragama Di Abad Dua Satu*, (Jakarta: CV Zikrul Hakim, 1997), h 222

³² Nur Achmad, (ed), *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2001), h. 12. Dalam pengertian lain, Pluralisme adalah pemahaman akan kesatuan dan perbedaan, yaitu kesadaran mengenai suatu ikatan kesatuan dalam arti tertentu bersama-sama dengan kesadaran akan keterpisahan dan perpecahan kategoris. Dan ada pula yang mengatakan bahwa Pengertian atau definisi pluralisme dipahami sebagai doktrin metafisik yang memandang bahwa seluruh eksistensi secara umum bisa menunjukkan jalan keselamatan. Hanya agama tertentu saja yang benar. Tuntutan semacam ini oleh pemerhati agama disebut sebagai *truth claim* (klaim kebenaran). Cara pandang seperti ini merupakan cara pandang yang tak bisa dihindari bagi seorang yang dibatasi sebuah tradisi agama tertentu. Namun ketika agama-agama itu lahir secara historis, ia berhadapan dengan kenyataan pluralitas keagamaan sebagai realitas sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Agama yang lain walaupun mempunyai jalan yang berbeda tetapi juga merupakan respon yang sama yang terhadap realitas Illahi. Lihat M. Syafi'i Anwar, "Sikap Positif Kepada Ahli Kitab", Jurnal *Ulumul Qur'an*, No. 4 Vol. IV tahun 1993, h. 17. Pemahaman seperti ini pada gilirannya membawa kepada cara pandang keagamaan yang inklusif, bahwa suatu agama menjelaskan tentang kebenaran final dan pada saat yang sama memandang agama-agama lain juga merefleksikan kebenaran agama. Keberagaman yang inklusif melihat adanya titik temu pada aspek tertentu dari berbagai tradisi agama.

Pada konteks agama, Alwi Shihab merumuskan konsep pluralisme sebagai berikut: *Pertama*, pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Seseorang baru dikatakan menyandang sifat pluralis, menurutnya, apabila ia dapat berinteraksi positif dalam lingkungan kemajemukan tersebut. Dengan kata lain pengertian pluralisme agama adalah bahwa setiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan. *Kedua*, pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme menunjuk kepada suatu realitas di mana aneka ragam agama, ras, dan bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi. Namun interaksi positif antara penduduk, khususnya di bidang agama, sangat minim, walaupun ada.³³

Seperti halnya Alwi Shihab yang menekankan konsep pluralisme pada terjalannya saling pengakuan dan pengertian, Farid Esack juga mendefinisikan pluralisme sebagai sebuah pengakuan dan bentuk penerimaan, bukan hanya sekedar toleran terhadap adanya keberbedaan dan keragaman antara sesama atau terhadap penganut agama lain.³⁴

Konsep pluralisme agama juga harus dibedakan dengan; a). Absolutisme keagamaan yang mengklaim bahwa hanya di dalam agamanya sendiri terdapat kebenaran dan keselamatan. b). relativisme keagamaan yang meyakini bahwa semua agama sama saja, sehingga tidak ada keunikan dalam masing-masing agama. Pluralisme agama justru mengakui bahwa semua agama memiliki keunikannya masing-masing sesuai dengan pengalaman iman mereka masing-masing. Keunikan itu tercermin dalam simbol-simbol keagamaan masing-masing, yang merupakan sarana dan wujud penghayatan hubungan dengan Tuhan. Mengakui dan menerima pluralisme agama bukan

³³ Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 2001), h. 41-42

³⁴ Farid Esack, *Qur'an Liberation and Pluralism*, (Oxford: Oneworld Publications, 1997), h. 179

sekedar menerima fakta kemajemukan agama, melainkan juga mengakui kenyataan bahwa simbol-simbol agama mana pun mengungkapkan hubungan dengan Tuhan.³⁵

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Nurchalis Madjid yang menyatakan bahwa paham keagamaan hendaknya menghilangkan absolutisme dan menerima pluralisme, bila agama itu diharapkan memberikan kontribusi dalam agama, tetapi pemahaman manusia terhadap yang mutlak tetap dibatasi oleh kapasitasnya sebagai manusia. Sumber konflik agama biasanya terdapat pada sikap-sikap yang mengklaim bahwa hanya dirinyalah yang paling benar dan yang lain dianggap salah. Karena itu pengajaran keagamaan hendaknya belajar meninggalkan fikiran-fikiran absolutistik dan mengajarkan kepada penganut agama untuk bersikap moderat dan toleran serta menerima pluralisme.³⁶

Dengan demikian *pluralisme* dapat difahami dan diidentifikasi dengan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, Selalu berkaitan dengan memelihara dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban³⁷ masing-masing kelompok, dalam berbagai bentuk strata sosial, agar dapat berperan sebagaimana yang dapat mereka laksanakan dalam bentuk kewajiban dan tanggung jawab bersama sebagai makhluk Tuhan.

³⁵ JB. Banawiratma, S.J. (ed.), *Gereja Indonesia, Quo Vadis?: Hidup Menggereja Kontekstual*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 184. Mengenai keberagaman simbol-simbol keagamaan yang berkaitan dengan pengalaman iman masing-masing agama, Amin Abdullah mengatakan bahwa "umat beragama perlu juga memahami bahwa fenomena agama, selain melibatkan wahyu", juga lengket dengan fenomena kultural, tradisi, bahasa, adat istiadat, *habit of mind*, dan begitu seterusnya." Lihat, M. Amin Abdullah, "Kebebasan Beragama atau Dialog Antaragama: 50 Tahun Hak Asasi Manusia." dalam J.B.Banawiratma, SJ, dkk, *Hak Asasi Manusia: Tantangan Bagi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), h. 59

³⁶ Kompas, 5 Mei 1999

³⁷ Hak dan kewajiban dimaksudkan, semua warga negara, sebagai individu dan sebagai anggota dari kelompok dan lembaga yang berbeda, harus menerima kewajiban untuk mengenali dan membantu melindungi hak orang lain. Hak harus disertai tanggung jawab, kecenderungan untuk menegaskan hak dengan melupakan tanggung jawab menimbulkan akibat yang mengganggu. Dalam jangka panjang, hak hanya dapat dilindungi jika dilaksanakan secara bertanggung jawab dan menghormati orang lain. Lihat, Laporan Komisi Pemerintahan Global, *Kerukunan Dunia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 70.

Kedua, menghargai perbedaan dalam kebersamaan masyarakat yang benar-benar memiliki karakteristik plural dan meyakini bahwa setiap pihak berada dalam posisi yang sama secara positif. Mereka meyakini bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang lebih unggul dari kelompok lain dalam berbagai hal. Sebagai warga masyarakat mereka mempunyai hak, kedudukan, kewajiban dan tanggungjawab yang sama. Perbedaan tidak difahami sebagai ancaman terhadap eksistensi suatu kelompok.

Ketiga, pluralisme menunjukkan kepada wahana untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berkompetisi secara jujur, terbuka dan adil. Karakteristik ini berkaitan dengan upaya menghilangkan pendapat, bahwa dalam kehidupan masyarakat ada kelompok *ordinate* yang mendominasi kelompok *subordinate*, kelompok mayoritas merasa lebih unggul dari kelompok minoritas.

Keempat, pluralisme harus didudukkan pada posisi yang proporsional. Perbedaan menjadi daya dorong untuk mendinamisasi kehidupan masyarakat, dan bukan mekanisme untuk menghancurkan satu kelompok terhadap kelompok lain. *Pluralisme* ada pada posisi yang netral, tidak memihak dan obyektif.

Kelima, pluralisme menunjukkan adanya perasaan kepemilikan bersama, untuk kepentingan bersama dan diupayakan bersama. Karakteristik semacam ini pada hakekatnya merupakan puncak dari kesadaran bahwa pluralisme merupakan menipestasi jati diri manusia.³⁸

Pluralisme diibaratkan *mozaik* dan tata warna yang indah dalam sebuah lukisan atau kelompok paduan suara secara bersama menyanyikan sebuah lagu dalam bentuk simponi yang indah di dengar dan di pandang.

Begitu pula *pluralisme* agama, yang kalau dapat dirinci sesuai dengan yang disebutkan di dalam Al-Qur'ān adalah, orang-orang *beriman*, orang-orang *Yahudi*, orang-orang *Nasrani*, orang-orang *Shābi'in*, orang-orang *Majusi* dan

³⁸ Abd.Rahman I Marasabessy, *Pluralisme Agama Perspektif al-Qur'an*, Disertasi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2005

orang-orang *Musyrikīn*. Hidup bersama menghuni bumi untuk kepentingan bersama, berdasarkan kepentingan kemanusiaan. Karena manusia beriman itu bersaudara sebagaimana disimpulkan oleh Nurcholish Madjid :

1. Semua orang yang beriman adalah saudara satu dengan lainnya.
2. Namun kaum beriman itu tidaklah semuanya sama dalam segala hal. Adanya perbedaan mungkin saja menimbulkan pertikaian, yang harus selalu diusahakan pendampingnya.
3. Perdamaian antara dua kelompok yang bertikai itu adalah dalam rangka taqwa kepada Allah.
4. Dan dengan taqwa itu Allah akan menganugerahkan rahmat-Nya yang mendasari jiwa persaudaraan.
5. Maka harus ada sikap saling menghormati, dengan tidak merendahkan suatu golongan lain.
6. Setiap golongan harus cukup rendah hati untuk mengakui kemungkinan diri mereka salah, dan golongan lain benar.
7. Sejalan dengan itu dilarang saling menghina sesama kaum beriman.
8. Juga dilarang memberi nama ejekan satu sama lain, apalagi jika ejekan kejahatan.
9. Yang tidak mengikuti itu semua adalah orang-orang zalim.
10. Kaum beriman harus menjauhkan banyak prasangka, karena itu bisa jahat.
11. Juga dilarang saling mencari kesalahan.
12. Dan dilarang pula melakukan pengumpatan (*ghībah, beck biting*), yaitu membicarakan keburukan sesama ketika yang dibicarakan itu tidak ada di tempat pembicaraan.
13. Melakukan *ghībah* itu bagaikan memakan daging mayat saudara sendiri, sebab orang yang dibicarakan keburukannya itu, karena tidak di tempat, tidak dapat membela diri, apalagi melawan. Jadi *ghībah* adalah kejahatan ganda, suatu kejahatan di atas kejahatan.

14. Sekali lagi kita kaum beriman diseru untuk bertaqwa kepada Allah, yaitu menyadari akan ada pengawasan Allah yang selalu hadir di mana pun kita berada, sehingga tidak sepatutnyalah seorang yang beriman melakukan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh-Nya.
15. Taqwa kepada Allah menghasilkan bimbingan ke arah budi pekerti yang luhur itu, maka Allah akan mengampuni kita dan memberi rahmat-Nya kepada kita.
16. Lebih lanjut, kita diingatkan bahwa seluruh umat manusia pun diciptakan Allah berbeda-beda, karena dijadikan oleh-Nya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.
17. Itu semua tidak lain ialah agar kita saling kenal dengan sikap saling menghormati (arti luas dari perkataan Arab *ta'āruf*).
18. Kita tidak boleh membagi manusia menjadi tinggi rendah karena pertimbangan-pertimbangan askriptif atau kenisbatan, seperti kebangsaan, kesukuan, dan lain-lain.
19. Sebab dalam pandangan Allah, manusia tinggi dan rendah hanyalah berdasarkan tingkat ketaqwaan yang telah diperolehnya.
20. Manusia tidak akan mengetahui dan tidak diperkenankan menilai atau mengukur tingkat ketaqwaan sesamanya itu. Allah Maha Tahu dan Maha Teliti.³⁹

Agama mengandung arti ikatan-ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Ikatan itu berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia. Satu kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap dengan pancaindra.⁴⁰

Dalam Musyawarah Nasional MUI VII yang diselenggarakan tanggal 26 s.d 29 Juli 2005, telah dikeluarkan 11 fatwa. Di antara fatwa-fatwa itu, salah

³⁹ Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius, Membumikan Nilai-nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Paramadina, 2000), h.31-32

⁴⁰ Harun Nasution, *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI-Press, 1985), h.

satunya adalah Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNASVII/MUI/II/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama. Fatwa ini menyatakan bahwa pluralisme adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.⁴¹ Dengan kata lain, MUI mengharamkan pluralisme hadir di tengah-tengah komunitas umat Islam yang merupakan mayoritas di negara ini.

Adapun dasar pertimbangan yang dijadikan MUI dalam mengharamkan pluralisme adalah:

1. Bahwa pada akhir-akhir ini berkembang paham pluralisme agama, liberalisme, dan sekularisme serta paham-paham sejenis lainnya di kalangan masyarakat.
2. Bahwa berkembangnya paham pluralisme agama, liberalisme, dan sekularisme serta di kalangan masyarakat telah menimbulkan keresahan sehingga sebagian masyarakat meminta MUI untuk menetapkan fatwa tentang masalah tersebut.
3. Bahwa karena itu MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang paham pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam.⁴²

Menanggapi fatwa MUI ini, bermunculan reaksi dari kelompok-kelompok umat Islam. Abdurrahman Wahid dari NU menentang keras fatwa tersebut seraya menegaskan bahwa MUI bukan institusi yang berhak menentukan apakah sesuatu hal benar atau salah. Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi juga menilai fatwa MUI ini merupakan langkah mundur terutama bagi kehidupan antar umat beragama.⁴³ Dawam Rahardjo melakukan kritikan keras terhadap langkah MUI yang menurutnya akan mengakibatkan terberangusnya kebebasan beragama dari bumi Indonesia.⁴⁴

⁴¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/ MUNAS VII/ MUI/II/2005 dalam Keputusan, Bagian Kedua: Ketentuan Hukum ayat (1)

⁴² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/ MUNAS VII/ MUI/II/2005

⁴³ *Kompas*, "Fatwa MUI Memicu Kontroversi", 30 Juli 2005

⁴⁴ Dawam Rahardjo, "Kala MUI Mengharamkan Pluralisme", kolom M. Dawam Rahardjo, dalam *Tempo Interaktif*, 01 Agustus 2005

Dari kalangan akademisi Islam pun timbul gugatan. Azyumardi Azra menilai ada kesalahpahaman tentang pengertian pluralisme yang dipakai sebagai acuan oleh MUI dengan pengertian pluralisme dalam wacana akademik. Ia juga meminta agar metodologi pembuatan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia ditinjau kembali.⁴⁵ Azyumardi Azra mengharapkan agar MUI bersedia mendiskusikan kembali sejumlah fatwa yang memicu kontroversi dan mengundang keresahan terutama di kalangan umat beragama di Indonesia. Dalam proses penyusunan fatwa, MUI seharusnya tidak sekedar mencari pertimbangan berdasarkan kajian fikih. Karena persoalan masyarakat modern sangat kompleks, sudah seharusnya MUI mencari masukan dan pertimbangan lain, misalnya dari pakar politik, sosiolog, dan keilmuan lainnya. Fatwa dikeluarkan dengan mempertimbangkan sisi budaya, agama, dan lain-lain dalam konteks kebangsaan. Azyumardi Azra juga menyayangkan sikap MUI yang mendefinisikan sendiri beberapa istilah seperti liberalisme dan pluralisme.⁴⁶

Pemahaman konseptual MUI tentang pluralisme sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNASVII/MUI/II/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama di bagian Ketentuan Umum: bahwa pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di surga.⁴⁷

Selanjutnya pada bagian kedua dari Fatwa MUI tentang Ketentuan Umum huruf c disebutkan bahwa dalam masalah akidah dan ibadah, umat Islam wajib bersifat eksklusif, dalam arti haram mencampuradukkan antara akidah dan ibadah

⁴⁵ Azyumardi Azra, "Metodologi Pembuatan fatwa MUI Harus Ditinjau" dalam *Tempo Interaktif*, 02 Agustus 2005

⁴⁶ Adian Husaini, *Pluralisme Agama: Haram Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2005), h. 24

⁴⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/ MUNAS VII/ MUI/II/2005 dalam Keputusan, Bagian satu: Ketentuan Umum

umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain. Pada huruf d disebutkan bahwa bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, umat Islam bersifat inklusif, dalam artian tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan.⁴⁸

Dari penjelasan di atas dapat dibedakan antara pluralitas dan pluralisme. Pluralitas merupakan suatu sikap toleransi yang harus ada pada setiap orang dalam menyikapi segala perbedaan yang ada. Karena perbedaan itu suatu hal yang tidak dapat dihindari. Oleh karenanya setiap orang harus menghormati perbedaan-perbedaan. Sementara pluralisme adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa setiap agama adalah sama serta masing-masingnya mempunyai kebenaran.

1.2. Multikulturalisme

Apabila ditelusuri ke berbagai sumber, istilah multikulturalisme sama halnya dengan istilah pluralisme dan pluralitas agama mengandung arti yang beragam. Tidak mudah untuk menarik benang merah antar definisi yang diajukan tersebut karena meskipun tema-tema yang diusungnya banyak kesamaan, namun masing-masing definisi memiliki makna, penekanan yang sering berbeda. Perbedaan definisi tersebut salah satunya disebabkan oleh perbedaan cara pandang pada setiap perumusan definisi dan pesan yang ingin disampaikan.⁴⁹

Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme adalah pandangan bahwa setiap kebudayaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama dengan setiap kebudayaan lain, sehingga setiap kebudayaan berhak mendapatkan tempat sebagaimana kebudayaan lainnya.⁵⁰ Sedangkan menurut Biku Parekh sebagaimana yang dikutip oleh Dody S. Truna memahami bahwa multikulturalisme tidak sekedar mengenai

⁴⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/ MUNAS VII/ MUI/II/2005 dalam Keputusan, Bagian Kedua: Ketentuan Hukum huruf c dan d

⁴⁹ Dody S. Truna, *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme: Telaah Kritis atas Muatan Pendidikan Multikulturalisme dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), h. 64

⁵⁰ Zakiyuddin Baidhawi, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005), h. 4

perbedaan dan identitas, ia adalah satu kumpulan tentang keyakinan dan praktek-praktek yang dijalankan oleh satu kelompok masyarakat untuk memahami diri mereka sendiri dan dunianya, serta mengatur kehidupan individual dan kolektif. Karenanya ia mensyaratkan penggunaan istilah multikulturalisme dan menyatakan suatu masyarakat disebut multikultural jika di dalamnya ada tiga ciri umum yang menunjukkan hal tersebut, yakni: 1) keanekaragaman subkultural; 2) Keanekaragaman perspektif dan 3) keanekaragaman komunal.⁵¹

Para peneliti dan pengkaji multikulturalisme di Indonesia biasanya membedakan konsep pluralisme dengan konsep multikulturalisme. Definisi sosiologis pluralisme dalam konteks keindonesiaan lebih sering dikonotasikan kepada pluralisme agama sehingga pengertiannya menjadi lebih mengarah kepada pluralisme agama. Sedangkan konsep multikulturalisme tidak hanya menegaskan pengakuan terhadap keberagaman atau pluralitas, akan tetapi lebih jauh lagi menekankan penghargaan atas keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Multikulturalisme juga menyangkut domain lainnya seperti politik, demokrasi, keadilan, penegakan hukum, kesetaraan, kesamaan kesempatan kerja, berusaha dan berprestasi, hak asasi manusia, hak budaya golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, tingkat dan mutu produktifitas, serta beberapa konsep lainnya yang relevan. Dalam konsep pluralisme, penekanan terhadap kesetaraan, keadilan, kesamaan hak, posisi kelompok minoritas, dan hak kelompok *diffable* belum begitu tegas. Sama halnya dengan perkembangan wacana multikulturalisme di berbagai penjuru dunia. Di Indonesia, konsep pluralisme dan toleransi telah lebih dahulu dikenal sebelum konsep multikulturalisme. Dalam konsep pluralisme di Indonesia, aspek kesetaraan, penghormatan, keadilan, penghargaan terhadap kaum minoritas, kesamaan kesempatan, perlakuan dan pelayanan menjadi ciri-ciri penting. Sama seperti dalam konsep multikulturalisme sekarang.⁵²

⁵¹ Dody S.Truna, *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme: Telaah Kritis atas Muatan Pendidikan Multikulturalisme dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum di Indonesia*, h. 65-66

⁵² Dody S.Truna, *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme: Telaah Kritis atas Muatan Pendidikan Multikulturalisme dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum di Indonesia*, h. 66-67

Meskipun istilah multikulturalisme sudah dikenal sejak lama lebih dari dua dekade yang lalu, namun istilah ini baru menjadi bahan diskusi di dunia akademik di Indonesia pasca reformasi. Wacana multikulturalisme untuk konteks Indonesia menemukan momentumnya ketika sistem nasional yang otoriter-militeristik tumbang seiring dengan jatuhnya rezim Suharto. Saat itu, keadaan negara menjadi kacau balau dengan berbagai konflik antar suku bangsa dan antar golongan yang menimbulkan keterkejutan dan kengerian para anggota masyarakat. Kondisi yang demikian membuat berbagai pihak semakin mempertanyakan kembali sisten nasional seperti apa yang cocok bagi Indonesia yang sedang berubah, serta sistem apa yang bisa membuat masyarakat Indonesia bisa hidup dama dengan meminimalisir potensi konflik.⁵³

Menurut Sosiolog UI Parsudi Suparlan sebagaimana yang dikutip oleh Pupu Saeful Rahmat, multikulturalisme adalah konsep yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman dengan alasan multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang mengagungkan perbedaan budaya, atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai corak kehidupan masyarakat. Multikulturalisme akan menjadi pengikat dan jembatan yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan termasuk perbedaan kesukubangsaan dan suku bangsa dalam masyarakat yang multikultural. Perbedaan ini dapat terwadahi di tempat-tempat umum, tempat kerja dan pasar, dan sistem nasional dalam hal kesetaraan derajat secara politik, hukum, ekonomi, dan sosial.⁵⁴

Oleh karena itu konsep multikulturalisme di Indonesia dalam banyak hal sebenarnya memiliki banyak kesamaan dengan konsep pluralisme yang telah dikenal lebih dahulu. Istilah pluralisme yang digunakan di Indonesia sebelum diperkenalkan istilah multikulturalisme memiliki substansi yang sama yaitu

⁵³ Pupu Saeful Rahmat, *Wacana Pendidikan Multikultural di Indonesia : Sebuah Kajian Terhadap Masalah-Masalah Sosial Yang Terjadi Dewasa Ini*. [Http://akhmad.sudrajat.wordpress.com/2008/04/04/wacana-pendidikan-multikultural-di-Indonesia](http://akhmad.sudrajat.wordpress.com/2008/04/04/wacana-pendidikan-multikultural-di-Indonesia). Diakses tanggal 28 September 2014

⁵⁴ Pupu Saeful Rahmat, *Wacana Pendidikan Multikultural di Indonesia : Sebuah Kajian Terhadap Masalah-Masalah Sosial Yang Terjadi Dewasa Ini*. [Http://akhmad.sudrajat.wordpress.com/2008/04/04/wacana-pendidikan-multikultural-di-Indonesia](http://akhmad.sudrajat.wordpress.com/2008/04/04/wacana-pendidikan-multikultural-di-Indonesia). Diakses tanggal 28 September 2014

menyangkut penagakuan, kesetaraan, keadilan, toleransi dan perlakuan yang sama. Hanya saja hal itu belum dirumuskan secara tegas.

Multikulturalisme, sebagai suatu paham yang bergerak untuk memahami dan menerima segenap perbedaan yang ada pada setiap individu manusia, bila tidak dikemas dalam ranah pendidikan dan pemyadaran akan memiliki potensi cukup besar bagi terjadinya konflik antar kelompok. Prinsip keberagaman di masing-masing kelompok misalnya akan mudah menimbulkan “percikan-percikan” konflik antar kelompok yang ada lantaran adanya beberapa perbedaan yang cukup prinsipil dari masing-masing kelompok itu. Bahkan dalam skala lebih luas, manifestasi dari prinsip multikulturalisme itu bisa merambah hingga perbedaan wilayah geografis, etnis, budaya, bahasa, agama, keyakinan, pola pikir, maupun perbedaan kemampuan (*diffable*) – secara fisik maupun phsikis. Perbedaan-perbedaan itulah yang sekiranya tidak segera diantisipasi akan menjadi pemicu konflik. Dan tidak jarang konflik itu akan akan berujung pada kekerasan fisik, bahkan hingga terjadi pertumpahan darah.⁵⁵

Problem perbedaan tidak hanya dialami pada tataran kehidupan antar umat beragama namun juga terdapat dalam masing-masing agama. Karena persoalan keberagaman sebenarnya tidak lepas dari interpretasi manusia akan teks suci atau *divine teks* yang dipercaya sebagai ungkapan langsung dari Tuhan kepada manusia. Sementara dalam kerangka kerja (*frame work*)-nya, tidak ada tafsir yang seragam terhadap suatu hal. Pastilah akan ada perbedaan yang disebabkan oleh banyak hal. Bisa jadi karena faktor budaya, ekonomi, politik, pendidikan, atau perbedaan tingkat peradaban. Persoalan perbedaan tafsir agama ini menjadi proplem pelik tatkala ada pihak yang menganggap bahwa otoritasnya saja yang paling berhak untuk menginterpretasikan tek suci dan hanya tafsirnya yang paling benar dan valid, sedang tafsir orang lain dianggap salah. Yang muncul kemudian, dengan semena-mena cap bid'ah, kafir, dan murtad disematkan kepada penafsir lain tersebut. Padahal kebenaran hakiki hanya ada pada *the author* (sang pencipta teks) yakni Tuhan itu sendiri. Tidak ada seseorang *interpreter* pun yang berhak

⁵⁵ Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), h. v

mengatasnamakan *the author* untuk hasil ijtihadnya. Masing-masing tafsir pastilah punya kans atau kesempatan untuk benar dan untuk salah pula.⁵⁶

Wacana multikulturalisme sangat dibutuhkan pada wilayah ini. Dengan memahami perbedaan tafsir atau teks, diharapkan akan menghasilkan pemahaman keberagaman yang inklusif, toleran, dan terbuka. Tidak ada lagi yang merasa mendapatkan mandat dari Tuhan untuk menjadi juru bicara-Nya dan mengklaim hasil pemaknaannya sebagai tafsir tervalid.⁵⁷

Terlepas dari perbedaan sikap tentang multikulturalisme, masyarakat multikultural adalah sebuah fakta. Fakta yang menantang presuposisi dan aspirasi kita. Di luar semua itu adalah sebuah fakta bahwa senakin bercampur baurnya penduduk seluruh dunia memberi tekanan kepada pemerintah, sistem pendidikan, dan ekonomi yang telah mapan. Penduduk dunia hidup dalam kedekatan dan berinteraksi dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang etnik dan kebangsaan. Semua orang terlahir berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing, namun disparatis dalam kebudayaan, sumber daya dan harapan-harapan ini pula yang melahirkan ketidakpuasan dan konflik sosial.⁵⁸

Ketika perbedaan nasionalitas, etnisitas, dan ras muncul bersamaan dengan perbedaan agama, posisi sosial dan ekonomi, potensi untuk berbenturan semakin besar. Singkatnya, realitas dunia multikultural kini sedang hadir di hadapan kita dan akan semakin menunjukkan intensitasnya dan eksistensitas dalam banyak aspek. Yang dibutuhkan kini adalah “pandangan dunia” yang mengajak untuk menghargai kebudayaan-kebudayaan orang lain dan tetap loyal pada kebudayaan kita sendiri. Inilah esensi multikulturalisme yang sedang diperbincangkan dan menjadi tumpuan harapan masa depan yang lebih manusiawi.

⁵⁶ Amin Abdullah, *Kesadaran Multikultural: Sebuah Gerakan :Interest Minimalization*” dalam *Meredakan Konflik Sosial* dalam Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan*, h. xi

⁵⁷ Amin Abdullah, *Kesadaran Multikultural: Sebuah Gerakan :Interest Minimalization*” dalam *Meredakan Konflik Sosial* dalam Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan*, h. xi

⁵⁸ Zakiyuddin Baidhawi, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005), h. 4

Oleh karena itu diperlukan sikap masing-masing kelompok bersedia untuk menyatu tanpa mempedulikan keragaman budaya yang dimilikinya. Mereka semua melebur, sehingga pada akhirnya ada proses “hidridisasi” yang meminta setiap orang/pihak untuk tidak menonjolkan perbedaan di masing-masing budayanya. Tidak ada pula semacam pemaksaan untuk harus menjadi satu budaya.⁵⁹

Permasalahan pokok yang dihadapi para pendidik dan penggerak sosial keagamaan para era kemajemukan dan era multikultural adalah bagaimana agar masing-masing tradisi keagamaan tetap dapat mengawetkan, memelihara, melanggengkan, mengalihgenerasikan, serta mewariskan kepercayaan dan tradisi yang diyakini sebagai suatu kebenaran mutlak, namun pada saat yang sama juga menyadari sepenuhnya keberadaan kelompok tradisi keagamaan lain yang juga berbuat serupa. Selain memperkuat identitas diri dan kelompoknya, upaya apa yang dapat dilakukan para pendidik sosial keagamaan dalam masing-masing tradisi untuk juga menjaga kebersamaan, kohesi sosial, dan keutuhan bersama?

Jika disadari perlu hal tersebut, lalu apa implikasi dan konsekwensi dari cara, metode, pilihan materi, serta teknik pendidikan dan pengajaran agama yang disajikan kepada masyarakat yang bercorak plural-majemuk-terbuka seperti sekarang ini? Masih adakah ruang untuk berfikir sejenak dan berdiskusi bersama kelompok-kelompok yang ada di tengah masyarakat majemuk dan multikultural?⁶⁰

B. Pendidikan Multikultural

Masyarakat Indonesia sangat dikenal dengan masyarakat majemuk yang meliputi beragam suku, agama, ras, dan antar golongan. Bila kenyataan ini dikembangkan dengan melalui pendidikan yang berwawasan multikultural, modal

⁵⁹ Najmuddin Ramly, *Membangun Pendidikan yang Memberdayakan dan Mencerahkan*, (Jakarta: Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu, 2005), h. xv

⁶⁰ M. Amin Abdullah, *Pendidikan Agama Era Multikultural - Multi Religius*, (Jakarta : PSAP, 2005), h. 3

pluralitas bangsa ini pada dasarnya dapat menghantarkan bangsa Indonesia menuju arah kemajuan.

Sayangnya modal sosial ini belum dikelola dengan baik. Pluralitas malah menampilkan eksese negatif dengan munculnya berbagai macam konflik. Hal ini disebabkan karena munculnya berbagai macam konflik sikap saling mencurigai dan fanatisme yang sangat berlebihan atas keunggulan kelompok atau golongannya. Banyak sekali kerugian yang diakibatkan dari konflik yang terjadi itu.⁶¹

Pendidikan dianggap sebagai sebuah titik tolak yang sangat jitu dalam menumbuhkan kesadaran akan sikap toleran dan harga menghargai terhadap kebudayaan atau identitas yang lain. Ini berarti pula bahwa pendidikan merupakan media strategis untuk menumbuhkan kesadaran multikultural dalam masyarakat yang majemuk. Yaitu kesadaran untuk saling membangun kebersamaan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu pengembangan pendidikan Islam secara realistis harus disinkronisasikan dengan kebijakan pendidikan nasional guna membebaskan bangsa dari himpitan berbagai persoalan.⁶² Salah satu bentuk pendidikan yang cukup relevan adalah pendidikan multikultural. Menurut Clive Beck sebagaimana yang dikutip oleh Syamsul Ma'arif mendefinisikan pendidikan multikultural dengan suatu metode pendidikan yang mengajarkan kepada peserta didik tentang budaya etnis yang dimilikinya, juga mengajarkan adanya berbagai macam kebudayaan tradisional. Dorongan untuk menerima setiap perbedaan etnis dalam masyarakat menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan agama, ras dan kebangsaan.⁶³

⁶¹ Najmuddin Ramly, *Membangun Pendidikan yang Memberdayakan dan Mencerahkan*, h. xi

⁶² A. Malik Fadjar, *Strategi Pengembangan Pendidikan Islam di Era Globalisasi*, dalam M. Zainuddin dan Muhammad In'am Esa (ed), *Horizon Baru Pengembangan Pendidikan Islam Upaya Merespon Dinamika Masyarakat Global*, (Malang: UIN Press, 2004), h. xxi-xxii

⁶³ Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, (Jogjakarta: Penerbit Logung Pustaka, 2005), h. 8

Pada era ini umat manusia dihadapkan pada tantangan dan resiko baru yang keadaannya berbeda dan lebih berat dibandingkan dengan tantangan yang dijumpai di masa sebelumnya. Umat Manusia dituntut menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya sehingga ia tidak salah memilih dan menentukan langkah. Kesalahan dalam memilih dan menentukan langkah di era global ini akan berakibat fatal. Manusia dituntut untuk semakin cerdas dan arif memahami perubahan dan sekaligus mencari solusinya sehingga dapat merubah tantangan tersebut menjadi peluang.⁶⁴

Pendidikan multikultural adalah sebuah pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara menyeluruh membongkar kekurangan, kegagalan, dan praktik-praktik diskriminasi dalam proses pendidikan. Pendidikan multikultural didasarkan pada gagasan keadilan sosial dan persamaan hak dalam pendidikan. Pendidikan multikultural merupakan suatu komitmen untuk memfasilitasi pengalaman belajar yang memungkinkan setiap siswa mencapai potensi maksimal sebagai pelajar dan sebagai pribadi yang aktif dan memiliki kepekaan sosial di tingkat lokal, nasional, maupun global.⁶⁵

Dalam pendidikan multikultural, diskriminasi adalah permasalahan utama yang menjadi latar belakang pentingnya penerapan strategi pendidikan tersebut. Diharapkan dengan menerapkan strategi pendidikan ini maka generasi yang akan datang akan menjadi generasi yang selalu menjunjung tinggi keadilan, demokrasi dan humanisme.⁶⁶

Strategi pendidikan multikultural, sejak lama telah berkembang di Eropa, Amerika, dan negara-negara maju lainnya. Gagasan ini dengan demikian bukan merupakan hal baru. Strategi ini adalah pengembangan dari studi interkultural dan multikulturalisme.⁶⁷

⁶⁴ Abudin Nata, *Pendidikan Islam di Era Global (Pendidikan Multikultural, Pendidikan Multi Iman, Pendidikan Agama, Moral, dan Etika)*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h. 247

⁶⁵ Melani Budianta, *Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural: Sebuah Gagasan Umum*, dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vo. 1, No.2, Tahun 2003, h. 13

⁶⁶ Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan*, h. 23

⁶⁷ Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan*, h. 23

Ada dua istilah penting yang berdekatan secara makna dan merupakan suatu perkembangan yang sinambung yakni pendidikan multietnik dan pendidikan multikultural. Pendidikan multietnik sering dipergunakan di dunia pendidikan sebagai suatu usaha sistemik dan berjenjang dalam rangka menjembatani kelompok-kelompok rasial dan kelompok-kelompok etnik yang berbeda dan memiliki potensi untuk melahirkan ketegangan dan konflik. Sementara itu istilah pendidikan multikultural memperluas payung pendidikan multietnik sehingga memasukkan isu-isu lain seperti relasi gender, hubungan antar agama, kelompok kepentingan, kebudayaan dan subkultur, serta bentuk-bentuk lain dari keragaman.⁶⁸

Secara sederhana pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan untuk/tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan”.⁶⁹

Paulo Freire berpendapat, pendidikan bukan merupakan menara gading yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Pendidikan menurutnya, harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya.⁷⁰ Pendidikan multikultural (*multicultural education*) merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Secara luas pendidikan multikultural itu mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti gender, etnik, ras, budaya, strata sosial dan agama.

⁶⁸ Zakiyuddin Baidhawi, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, h. 6

⁶⁹ Ali Maksum, *Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2011), h. 90

⁷⁰ Paulo Freire, *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*, terj. Alois A. Nugroho (Jakarta: Gramedia, 1984), h. 4

James Bank, membumikan konsep pendidikan multikultural menjadi ide persamaan pendidikan- mengatakan bahwa substansi pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk kebebasan (*as education for freedom*) sekaligus sebagai penyebarluasan gerakan inklusif dalam rangka mempererat hubungan antar sesama (*as inclusive and cementing movement*).⁷¹

Lebih mendalam Tilaar mengungkapkan bahwa dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultural domain atau mainstream. Fokus seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya mainstream yang dominan, yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat mainstream. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap “peduli” dan mau mengerti (*difference*), atau “*politics of recognition*” politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas.⁷²

Pendidikan multikultural adalah suatu cara untuk mengajarkan keragaman (*teaching diversity*). Pendidikan multikultural menghendaki rasionalitas etis, intelektual, sosial, dan pragmatis secara inter-relatif: yaitu mengajarkan ideal-ideal inklusivisme, pluralisme dan saling menghargai semua orang, mengintegrasikan studi tentang fakta-fakta, sejarah, kebudayaan, nilai-nilai, struktur, perspektif, dan kontribusi semua kelompok ke dalam kurikulum sehingga dapat membangun pengetahuan yang lebih kaya, kompleks dan akurat tentang

⁷¹ Paulo Freire, *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*, terj. Alois A. Nugroho, h. 157

⁷² H.A.R, Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 59.

kondisi kemanusiaan di dalam dan melintasi konteks waktu, ruang, dan kebudayaan tertentu.⁷³

Melihat dan memperhatikan pengertian pendidikan multikultural di atas, dapat diambil beberapa pemahaman, antara lain; *pertama*, pendidikan multikultural merupakan sebuah proses pengembangan yang berusaha meningkatkan sesuatu yang sejak awal atau sebelumnya sudah ada. Karena itu, pendidikan multikultural tidak mengenal batasan atau sekat-sekat sempit yang sering menjadi tembok tebal bagi interaksi sesama manusia.

Kedua, pendidikan multikultural mengembangkan seluruh potensi manusia, meliputi, potensi intelektual, sosial, moral, religius, ekonomi, potensi kesopanan dan budaya. Sebagai langkah awalnya adalah ketaatan terhadap nilai-nilai luhur kemanusiaan, penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang, penghargaan terhadap orang-orang yang berbeda dalam hal tingkatan ekonomi, aspirasi politik, agama, atau tradisi budaya.

Ketiga, pendidikan yang menghargai pluralitas dan heterogenitas. Pluralitas dan heterogenitas adalah sebuah keniscayaan ketika berada pada masyarakat sekarang ini. Dalam hal ini, pluralitas bukan hanya dipahami keragaman etnis dan suku, akan tetapi juga dipahami sebagai keragaman pemikiran, keragaman paradigma, keragaman paham, keragaman ekonomi, politik dan sebagainya. Sehingga tidak memberi kesempatan bagi masing-masing kelompok untuk mengklaim bahwa kelompoknya menjadi panutan bagi pihak lain. Dengan demikian, upaya pemaksaan tersebut tidak sejalan dengan napas dan nilai pendidikan multikultural.

Keempat, pendidikan yang menghargai dan menjunjung tinggi keragaman budaya, etnis, suku dan agama. Penghormatan dan penghargaan seperti ini merupakan sikap yang sangat urgen untuk disosialisasikan. Sebab dengan

⁷³ Zakiyuddin Baidhawi, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, h. 8

kemajuan teknologi telekomunikasi, informasi dan transportasi telah melampaui batas-batas negara, sehingga tidak mungkin sebuah negara terisolasi dari pergaulan dunia.

Dengan demikian, *privilege* dan privasi yang hanya memperhatikan kelompok tertentu menjadi tidak relevan. Bahkan bisa dikatakan “pembusukan manusia” oleh sebuah kelompok. Dalam konteks itu, pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap “*indifference*” dan “*Non-recognition*” tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur rasial, tetapi paradigma pendidikan multikultural mencakup subyek-subyek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang: sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya.⁷⁴ Paradigma seperti ini akan mendorong tumbuhnya kajian-kajian tentang ‘*ethnic studies*’ untuk kemudian menemukan tempatnya dalam kurikulum pendidikan sejak dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tujuan inti dari pembahasan tentang subyek ini adalah untuk mencapai pemberdayaan (*empowerment*) bagi kelompok-kelompok minoritas dan *disadvantaged*.⁷⁵

Secara garis besar, paradigma pendidikan multikultural diharapkan dapat menghapus *stereotype*, sikap dan pandangan egoistik, individualistik dan eksklusif di kalangan anak didik. Sebaliknya, dia senantiasa dikondisikan ke arah tumbuhnya pandangan komprehensif terhadap sesama, yaitu sebuah pandangan yang mengakui bahwa keberadaan dirinya tidak bisa dipisahkan atau terintegrasi dengan lingkungan sekeliling yang realitasnya terdiri atas pluralitas etnis, rasionalisme, agama, budaya, dan kebutuhan.⁷⁶

Oleh karena itu, cukup proporsional jika proses pendidikan multikultural diharapkan membantu para siswa dalam mengembangkan proses identifikasi (pengenalan) anak didik terhadap budaya, suku bangsa, dan masyarakat global.

⁷⁴ Nur Achmad, (ed.), *Pluralitas Agama Kerukunan Dalam Keragaman*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2001), h. 56

⁷⁵ Nur Achmad, (ed.), *Pluralitas Agama Kerukunan Dalam Keragaman*, h. 57

⁷⁶ Choerul Mahfudz, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 276

Pengenalan kebudayaan maksudnya anak dikenalkan dengan berbagai jenis tempat ibadah, lembaga kemasyarakatan dan sekolah. pengenalan suku bangsa artinya anak dilatih untuk bisa hidup sesuai dengan kemampuannya dan berperan positif sebagai salah seorang warga dari masyarakatnya. Sementara lewat pengenalan secara global diharapkan siswa memiliki sebuah pemahaman tentang bagaimana mereka bisa mengambil peran dalam percaturan kehidupan global yang dia hadapi.

Dengan pendidikan semacam ini kita menginginkan agar siswa atau pelajar dari tingkat sekolah dasar, menengah hingga perguruan tinggi dapat tumbuh dalam suatu dunia yang bebas dari prasangka, bias, dan diskriminasi atas nama apapun –agama, gender, ras, warna kulit, kebudayaan, kelas dan sebagainya- untuk mencapai suatu tujuan mereka dan merasakan bahwa apapun yang mereka kehendaki untuk dapat terlaksana dalam kehidupan ini menjadi mungkin.

Konsep pendidikan multikultural akhirnya diadopsi oleh UNESCO dan direkomendasikan menjadi komitmen global pada tahun 1994 di Janewa. Rekomendasi tersebut diantaranya mencakup:

1. Pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerjasama dengan yang lain
2. Pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkuat perdamaian, persaudaraan, dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat
3. Pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan;
4. Karena itu pendidikan juga hendaknya meningkatkan pengembangan kedamaian dalam diri dan pikiran peserta didik sehingga dengan demikian

mereka mampu membvangun secara lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk berbagi dan memelihara.⁷⁷

C. Implementasi Dalam Dunia Pendidikan

Fokus kajian multikulturalisme dan pendidikan multikultural menyangkut beberapa aspek kebudayaan, di antaranya sebagai berikut:

1. Etnisitas dan kesukuan
2. Ras dan warna kulit
3. Nasionalisme (faham kebangsaan)
4. Agama
5. Gender
6. Tingkat sosial ekonomi
7. Kelas dan status sosial
8. Difabilitas
9. Kelompok sosial
10. Bahasa
11. Kelompok usia
12. Demokrasi
13. Minoritas-mayoritas
14. Hak asasi manusia (HAM)

Tema-tema ini terus berkembang pada aspek-aspek kebudayaan lainnya dalam masyarakat sejalan dengan perkembangan pemikiran dan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. Pada beberapa negara yang mengalami konflik etnik, maka masalah-masalah yang terkait dengan latar etnik berkembang, demikian halnya pada kelompok masyarakat atau negara yang sedang mengalami persoalan konflik agama pada rakyatnya, maka masalah agama menjadi semakin berkembang sampai merembes ke masalah-masalah lainnya.⁷⁸

⁷⁷ Pupu Saeful Rahmat, *Wacana Pendidikan Multikultural di Indonesia : Sebuah Kajian Terhadap Masalah-Masalah Sosial Yang Terjadi Dewasa Ini*. <http://akhmad.sudrajat.wordpress.com/2008/04/04/wacana-pendidikan-multikultural-di-Indonesia>. Diakses tanggal 28 September 2014

⁷⁸ Dody S.Truna, *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme: Telaah Kritis atas Muatan Pendidikan Multikulturalisme dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum di Indonesia*, h. 123

Dalam menentukan tema-tema multikulturalisme dalam pendidikan multikultural Dody S. Truna menyatakan bahwa pemikiran-pemikiran Barat cukup berpengaruh dalam membentuk wacana multikulturalisme di kalangan penulis dan peneliti di Indonesia. Dalam kenyataan dapat ditemukan bahwa kajian-kajian pluralisme dan multikulturalisme di Indonesiayang dimuat di jurnal-jurnal, diterbitkan dalam bentuk buku-buku atau dalam paper-paper yang dipresentasikan oleh para sarjana Indonesia sejauh ini pada umumnya masih dominan menggunakan cara pandang Barat.⁷⁹

Masalahnya jika rujukannya adalah Amerika dan Eropa atau India, maka konteks Amerika, Eropa, politik dan agama Kristennya atau India dengan agama Hindunya tidak boleh diabaikan. Perspektif Amerika, Eropa dan India tidak serta merta dapat digunakan untuk konteks Indonesia yang memiliki ciri-ciri kultural yang khas Indonesia. Termasuk jika menyangkut Umat Islam di Indonesia. Jika peristiwa-peristiwa di Barat atau di Timur (kawasan India) dijadikan rujukan, maka diperlukan proses abstraksi, subyektifikasi, obyektifikasi dan rekonstruksi teoritik sehingga dapat digunakan dalam konteks Indonesia.

Kesadaran terhadap perlunya diperhatikan konteks budaya lokal dalam sebuah kajian ilmiah sebenarnya telah muncul di kalangan para pengkaji multikulturalisme di Indonesia. Chaerul Mahfudz misalnya secara implisit mengemukakan bahwa untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan yang merupakan bangunan konsep yang relevan yang harus dikomunikasikan sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain, demokrasi, keadilan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya dan komunitas, dan lain-lain.⁸⁰

⁷⁹ Dody S.Truna, *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme: Telaah Kritis atas Muatan Pendidikan Multikulturalisme dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum di Indonesia*, h. 86

⁸⁰ Choerul Mahfudz, *Pendidikan Multikultural*, h. 98

Dari beberapa persyaratan tersebut, tampak bahwa dalam mengkaji dan memperjuangkan ideologi multikulturalisme, konteks lokal, tidak dapat diabaikan. Dalam implementasinya memang tidak mudah untuk menggunakan konteks lokal Indonesia tersebut tanpa merujuk studi-studi dan menggunakan paradigma yang dibangun oleh para pengkaji dari dan di negara-negara serta kebudayaan lain karena seringkali terbentur oleh kelangkaan rujukan. Hal ini dapat dimengerti karena wacana multikulturalisme menurut Choerul Mahfudz masih merupakan barang baru bahkan masih terkesan asing.⁸¹ Sehingga pengalaman Indonesia tentang wacana multikulturalisme dan kajian-kajian multikultural dianggap belum membentuk wujudnya yang khas dan jelas sehingga belum meyakinkan para pengkaji untuk dijadikan sebuah model yang khas Indonesia.

Multikulturalisme bukan ideologi yang berdiri sendiri, terpisah dari ideologi-ideologi lainnya. Ia membutuhkan seperangkat konsep-konsep yang merupakan bangunan konsep-konsep untuk dijadikan acuan dalam upaya memahaminya dan mengembangukannya dalam kehidupan bermasyarakat. Di sinilah pentingnya konteks keindonesiaan diperhatikan dalam mengembangkan wacana multikulturalisme di Indonesia. Dengan keragaman latar agama, budaya, etnik dan sejarahnya, Indonesia memiliki cirinya sendiri. Islam sebagai salah satu agama yang dipeluk mayoritas penduduk Indonesia amat berpengaruh terhadap pembentukan budaya nasional, terutama di daerah-daerah berpenduduk mayoritas muslim. Masalah mayoritas-minoritas merupakan isu yang sangat sensitif dalam konteks kerukunan. Akan tetapi hal ini adalah fakta yang tidak boleh diabaikan. Peranan mayoritas muslim di Indonesia dalam proses pembentukan baik dan buruknya karakter bangsa Indonesia amat besar.⁸²

⁸¹ Choerul Mahfudz, *Pendidikan Multikultural*, h. 95

⁸² Dody S.Truna, *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme: Telaah Kritis atas Muatan Pendidikan Multikulturalisme dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum di Indonesia*, h. 88-89

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Noeng Muhadjir mengatakan bahwa penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan hasil analisis suatu variabel penelitian.⁸³ Sedangkan Imron Arifin mengatakan bahwa penelitian kualitatif bersifat fleksibel, terbuka dan dapat dikondisikan berdasarkan lapangan penelitian.⁸⁴

B. Tempat dan waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta dan Jurusan Tarbiyah STAIN Manado, dan berkaitan dengan karakteristik permasalahan yang dikaji dan efektifitas pelaksanaan penelitian yang memungkinkan terpenuhinya keakuratan data dan informasi yang diperlukan, maka penelitian ini dilaksanakan mulai Mei – Desember 2014. Jadwal pelaksanaan penelitian ini meliputi kegiatan observasi awal dan wawancara sampai dengan penulisan penelitian sebagai bentuk laporan hasil penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti berusaha memotret data yang ada secara utuh dengan menggunakan metode observasi. Penggunaan teknik observasi dimaksudkan untuk melakukan penyelidikan awal terhadap obyek yang menjadi sampel lokasi penelitian sehingga diperoleh data dan informasi yang bersifat umum. Pengumpulan data dilakukan dengan melaksanakan serangkaian penelitian secara langsung di lapangan sehingga dapat diperoleh data primer dan sekunder serta informasi yang berkaitan secara langsung mengenai keadaan nyata dan aktual dari dinamika yang terjadi sehingga keakuratan proses penjaringan data-data melalui

⁸³ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1998), h. 21

⁸⁴ Imron Arfhan, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, (Malang : Kalimasada Press, 1996), h. 40

teknik ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian pemahaman peneliti terhadap kondisi yang terjadi merupakan acuan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam.

Data-data yang dihimpun dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi: dokumen-dokumen resmi yang memuat peraturan-peraturan tentang kebijakan pelaksanaan pendidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta dan STAIN Manado mencakup statuta, renstra, SOP, pedoman akademik, kurikulum, dan penjamin mutu. Sedangkan data-data sekunder meliputi buku-buku yang membahas pendidikan multikultural.

Untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik informasi dokumentasi. Penelitian melalui studi dokumenter lebih diarahkan pada penelitian terhadap dokumen-dokumen yang memuat peraturan-peraturan pelaksanaan pendidikan. Kegiatan awal yang dilakukan peneliti yaitu menemui setiap informan kunci untuk memperoleh dokumen yang diperlukan untuk menunjang perolehan data penelitian. Informasi yang berupa dokumen dan catatan lainnya ini sesungguhnya cukup bermanfaat bagi data penelitian.

D. Metode Analisis Data

Data kualitatif yang diperoleh dalam penelitian ini, kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan tahapan proses analisis sebagai berikut:

1. Identifikasi dan pemetaan konsep pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal pada Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta dan Prodi PAI Jurusan Tarbiyah STAIN Manado
2. Analisis terhadap identifikasi dan pemetaan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal pada Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta dan Prodi PAI Jurusan Tarbiyah STAIN Manado
3. Rumusan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal pada Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta dan prodi PAI Jurusan Tarbiyah STAIN Manado

E. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap penelitian merupakan proses di mana peneliti dari awal melakukan penelitian untuk mencari data yang dibutuhkan hingga selesai dan dapat dipaparkan dengan baik. Bogdan dan Biklen menyajikan tiga tahapan yaitu pralapangan, kegiatan lapangan, dan analisis intensif. Tahap-tahap tersebut diuraikan berikut ini:⁸⁵

1. Tahap pralapangan

Tahap orientasi atau tahap pralapangan adalah mengunjungi dan bertatap muka dengan pihak yang bersangkutan dan menghimpun berbagai sumber sementara tentang konsep pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta dan Jurusan Tarbiyah STAIN Manado.

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan oleh peneliti: (1) menyusun rancangan atau desain penelitian, seperti yang sudah dijelaskan di depan; (2) memilih lapangan penelitian. Penelitian ini berlokasi UIN Jakarta dan STAIN Manado; (3) mengurus perizinan.; (4) menjajaki dan menilai lapangan. Peneliti sudah mempunyai orientasi terhadap lapangan penelitian, (5) memilih dan memanfaatkan informasi. Informasi adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar serta subjek penelitian; dan (6) menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap kegiatan lapangan

Pada tahap kegiatan lapangan, ada tiga langkah yang dilakukan, yaitu (1) memahami latar penelitian; (2) persiapan diri memasuki lapangan dan; (3) berperan serta sambil mengumpulkan data. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan metode-metode yang telah ditentukan sebelumnya. Memahami latar belakang penelitian dan mempersiapkan diri,

⁸⁵Bogdan, R. dan Biklen, S.K. *Qualitatif Research for Education: an Introduction to Theory and Method*. (Boston: Allyn and Bacon, 1982), h. 126

mengadakan observasi langsung, melakukan wawancara sebagai subjek penelitian, dan menggali data penunjang melalui dokumen-dokumen.

3. Tahap analisis data

Pada tahap ini peneliti melakukan penghalusan data yang diperoleh dari subjek. Informasi maupun dokumen dengan memperbaiki bahan dan sistematikanya agar dalam laporan hasil penelitian tidak terjadi kesalahpahaman maupun salah penafsiran.

F. Rincian Anggaran Penelitian

Biaya penelitian ini dibebankan kepada anggaran DIPA STAIN Manado tahun 2015 sebanyak Rp. 6.700.000,- dengan perincian sebagai berikut:

1. Pembuatan Proposal	: Rp. 700.000
2. Pengadaan Referensi	: Rp. 3.000.000
3. Pencarian Data	: Rp. 1.000.000
4. Penyusunan Laporan	: Rp. 1.000.000
5. Penggandaan Laporan	: <u>Rp. 1.000.000</u>
Jumlah	Rp. 6.700.000., (<i>Enam Juta Tujuh Ratus Rupiah</i>)

BAB IV

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL

A. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Jakarta

1. Gambaran Umum FITK UIN Jakarta

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan salah satu fakultas yang memiliki komitmen untuk terus melakukan peningkatan kualitas layanan dalam rangka peningkatan kualitas lulusan, agar mereka memiliki daya saing yang kuat, memiliki kemampuan profesional yang diandalkan, dan pada gilirannya akan mampu meningkatkan kepercayaan serta ekspektasi masyarakat terhadap institusi yang menjadi bagian penting dalam sejarah awal berkembangnya UIN Jakarta.⁸⁶

Fakultas Ilmu tarbiyah dan Keguruan (FITK), selain Fakultas Adab dan Humaniora adalah fakultas tertua yang ada di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Embrio FITK adalah Jurusan Pendidikan Agama Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) yang berdiri pada 1 Juni 1957. Ketika ADIA di Jakarta dan PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) di Yogyakarta digabung menjadi IAIN al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah pada tahun 1960, IAIN cabang Jakarta diserahi tugas mengelola Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Adab. Sementara IAIN di Yogyakarta diberi tugas mengelola Fakultas Ushuluddin dan fakultas Syari'ah.

Pada saat didirikan, Fakultas Tarbiyah memiliki tiga jurusan, yaitu Jurusan Pendidikan Agama Islam, Jurusan Pendidikan Guru Bahasa Arab dan Jurusan Khusus (Imam Tentara). Jurusan terakhir ini, yang juga disebut jurusan Dakwah wal Irsyad, bergabung dengan Fakultas Ushuluddin ketika Fakultas ini didirikan pada tahun 1962.

Perjalanan selanjutnya Fakultas Tarbiyah mengalami kemajuan dengan pengembangan dan pengurangan berbagai jurusan, sepeerti jurusan peadagogi yang kini sudah tidak dikembangkan lagi. Bahkan jurusan-jurusan Tadris

⁸⁶ Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2010-2015

Matematika, IPA, IPS, dan bahasa Indonesia yang dikembangkan pada awal tahun 1980-an, tahun 1986 sudah tidak dibolehkan menerima mahasiswa baru, karena lulusannya tidak terangkat sebagai PNS di lingkungan Departemen Agama untuk penugasan di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Hal ini terjadi akibat problem administratif yang terkait dengan kewenangan penetapan gelar akademik bagi para lulusan-jurusan-jurusan tersebut. Akan tetapi karena desakan kebutuhan di lapangan, jurusan-jurusan tersebut dikembangkan lagi pada dekade 1990-an. Ketika IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta berubah menjadi Universitas Islam Negeri tanggal 20 Mei 2002 berdasarkan kepres No. 31 tahun 2002, selain nama Fakultas diubah menjadi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), jurusan dan program studinya pun berkembang yang meliputi :

1. Jurusan Pendidikan Agama Islam
2. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab
3. Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris
4. Jurusan Pendidikan Matematika
5. Jurusan Pendidikan IPA, dengan 3 program studi:
 - 1) Program Studi Pendidikan Biologi
 - 2) Program Studi Pendidikan Fisika
 - 3) Program Studi Pendidikan Kimia
6. Jurusan Kependidikan Islam, dengan 2 program studi
 - 1) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
 - 2) Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
7. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
8. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Dalam perjalanan sejarahnya, FITK telah mengalami beberapa kali perubahan dan pergantian kepemimpinan yang secara berturut-turut adalah sebagai berikut : Prof. Dr. H. Mahmud Yunus (1957-1960 dan 1960-1963), Prof. Dr. Soenardjo (1963-1965), H.M Anshor Suryohadibroto (1966-1967), H.M. Nur Asyik, MA (1970-1972), Drs. Agustiar, MA (1974-1976), Drs, H. Zakaria Hakim (1976-1979), Drs. H. Machsini Idham (1980- 1984 dan 1987-1994, Prof. Dr. Aminuddin Rasyad (1984-1987), Prof. Dr. Salman Harun (1994-1996 dan 2000-

2005), Prof. Dr. Rif'at Syauqi Nawawi, MA (1996-2000 dan 2012-2013), Prof. Dr. Dede Rosyada, MA (2000-2009 dan 2009-2011), Nurlena Rifa'i, MA, Ph.D (2011 – 2012 dan 2013- 2017).⁸⁷

Arah pengembangan dan peningkatan mutu kualitas FITK, dapat dilihat pada renstra yang disusun oleh fakultas ini. Dalam memilih strategi dan menentukan indikator keberhasilan, Fakultas Ilmu tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mempertimbangkan dengan cermat nilai dasar, kondisi internal dan eksternal, yang menjadi acuan arah pengembangan program 5 tahun ke depan. Hal tersebut didasarkan kepada beberapa pertimbangan, yaitu :

1. FITK dipandang sebagai fakultas tertua yang diharapkan menjadi pelita bagi fakultas-fakultas lain di lingkungan UIN syarif Hidayatullah Jakarta dalam mengembangkan kampus ini sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya besar dalam skala lokal maupun nasional, tapi dapat berkiprah secara riil dalam tataran internasional, baik dari sisi kualitas akademik maupun pengakuan (*recognize*) secara internasional.
2. Sebagai lembaga pendidikan Tenaga Keguruan yang memiliki tingkat kompetensi yang tinggi, baik kompetensi akademis, profesional, sosial, maupun kepribadian yang terangkum dalam kalimat *Excellence* dan *Research Faculty*. Semua ini merupakan tuntutan standar mutu pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Keputusan menjadikan FITK sebagai lembaga yang *Excellence* dan *Research Faculty*, menuntut civitas akademika FITK dapat melakukan akselerasi dalam mewujudkan visi dan misinya, yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan agama, ilmu dan keindonesiaan dalam rangka membangun fakultas yang unggul dan kompetitif.

Pengembangan Pendidikan yang diorientasikan kepada penyelenggaraan pendidikan berdasarkan penelitian didasarkan pada obyektifitas, spiritualitas, dan kontekstualitas. Implikasi dari hal tersebut antara lain adalah penyelenggaraan

⁸⁷ Pedoman Akademik Program Strata I 2013/2014 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

pendidikan dan pengajaran yang mengimplementasikan teori-teori yang ada, kemudian mengembangkan melalui penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan baik ilmu-ilmu *qur'aniyah* (tekstual), maupun ilmu-ilmu *kauniyah* (kontekstual).

Jika lulusan FITK telah memiliki kompetensi tersebut, maka mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik, yakni sebagai pendidik, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) sebagai tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu dapat menjalankan tugas tenaga kependidikan sebagaimana dalam pasal 39 ayat (1), yakni melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Kondisi ini tentu saja harus ada upaya peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu profesionalisme tenaga pendidik. Upaya tersebut diakui sebagai langkah yang paling strategis dan menentukan, karena para tenaga pendidiklah yang berada pada barisan terdepan dalam mengamtar para peserta didik menuju keunggulan kemampuan dan daya saing di tengah percaturan global.⁸⁸

2. Dasar dan Alur Perencanaan Strategis

a. Visi

Visi yang diusung oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah : Menjadi LPTK yang unggul, kompetitif, dan profesional dengan mengintegrasikan keilmuan, keislaman dan keindonesiaan.

b. Misi

Misi yang diemban Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebagai berikut :

⁸⁸ Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2010-2015

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran *research based learning, problem based learning* dan *contextual teaching & learning* dalam rangka *quality assurance*.
2. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan keilmuan dan inovasi pendmbangan keilmuan dan inovasi pendidikan
3. Mengembangkan pengabdian keilmuan dan karya-karya inovasi pendidikan kepada masyarakat
4. Mengembangkan komitmen dan budaya akademik bagi para sivitas akademika
5. Mengembangkan layanan administrasi akademik, umum, dan kemahasiswaan berbasis sistem manajemen mutu dan penerapan teknologi informatika (*informatics and communication technology*)
6. Mengembangkan *networking* dan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintahan, satuan pendidikan, dan lembaga lainnya, baik nasional maupun internasional
7. Melaksanakan evaluasi berkelanjutan terhadap penyelenggaraan program fakultas dalam rangka menjawab kebutuhan *stakeholders* fakultas.

c. Tujuan dan sasaran

Tujuan : menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, dan profesional serta mampu mengintegrasikan nilai keilmuan, keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan.

Sasaran : dalam rangka mencapai ujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai oleh FITK UIN Syarif Hidayauallah Jakarta adalah :

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sebagai pendidik, baik kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan keterampilan bahasa Inggris, Arab dan bahasa Asing lainnya
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan keterampilan kerja berbasis ICT (*informatics and communication technology*)
4. Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan nilai keilmuan, keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.

d. Motto dan Filosofi :

Moto merupakan gambaran ekspektasi ideal yang ingin diraih oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang secara umum terangkum dalam 3 (tiga) kata, yakni : unggul, kompetitif dan profesional.

1. Unggul, dimaksudkan bahwa lulusan/keluaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diharapkan memiliki keunggulan dalam penguasaan pengetahuan dan teknologi mutakhir tentang pendidikan dan memiliki keterampilan keguruan yang implementatif dan handal.
2. Kompetitif, dimaksudkan bahwa dengan keunggulan yang dimiliki oleh lulusan/keluaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan tidak meninggalkan distingsi sebagai seorang tenaga pendidik muslim yang berkeadaban, maka diharapkan lulusan FITK memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dalam memasuki bursa tenaga kerja.
3. Profesuinal, dimaksudkan bahwa dengan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh lulusan/keluaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, maka diharapkan akan menghadirkan sarjana muslim yang profesional dengan penguasaan ilmu, baik ilmu-ilmu keagamaan, sains dan bahasa sebagai *core* mutakhir yang dibentuk oleh pengelola fakultas yang profesional yakni pengelolaan yang dilakukan dengan ilmu, apresiatif, partisipatif, dan

menghargai sistem sebagai pilihan untuk mensimplikasi otoritas personal.⁸⁹

3. Program Studi Pendidikan Agama Islam FITK UIN Jakarta

a. Visi :

Visi Jurusan/Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah menjadi *center of excellence* dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan Pendidikan Agama Islam pada tahun 2021.

b. Misi:

Jurusan/Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengemban misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional yang inovatif dan efektif dalam bidang Pendidikan Agama Islam.
2. Melaksanakan penelitian yang inovatif dalam bidang pendidikan dan keislaman.
3. Mengembangkan keilmuan bidang Pendidikan Agama Islam secara integratif melalui kegiatan akademik.
4. Menyebarluaskan hasil kajian keilmuan bidang Pendidikan Agama Islam.

c. Tujuan Program Studi:

Dalam rangka mengemban misi tersebut, jurusan atau program studi Pendidikan Agama Islam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertujuan:

1. Menghasilkan tenaga pendidik Pendidikan Agama Islam
2. Menghasilkan pemikir Pendidikan Agama Islam yang produktif dan kompetitif
3. Menghasilkan karya akademik yang berstandar nasional dan internasional

⁸⁹ Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2010-2015

4. Memberikan kontribusi pemikiran pada pengembangan Pendidikan Agama Islam
5. Menghasilkan karya penelitian yang menjadi referensi dalam bidang pendidikan
6. Menghasilkan kajian keilmuan yang memberikan pengaruh pada wacana dan praktek Pendidikan Agama Islam.

d. Standar Kompetensi lulusan

Dalam rangka mengemban misi dan tujuan yang telah ditetapkan, lulusan jurusan atau program studi Pendidikan Agama Islam fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diharapkan memiliki :

1. Kemampuan dalam memahami peserta didik, perancangan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran
2. Kemampuan dalam menguasai keilmuan bidang studi dan metode pengembangannya
3. Sikap dewasa dalam bertindak, prilaku islami, rasa tanggung jawab, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
4. Kemampuan berkomunikasi dengan baik dan menjalin kerjasama yang baik dengan orang lain di kampus, sekolah, dan masyarakat.⁹⁰

e. Motto Jurusan PAI:

“ Religius, Akademis dan Ilmiah ”

f. Struktur Kurikulum

Fokus perubahan kurikulum jurusan PAI sebagaimana hasil workshop pada tahun 2011 dan workshop Kurikulum berbasis KKNi juli 2014 adalah:

1. Penguatan kompetensi pedagogis dengan menambah mata kuliah dan jumlah sks yang terkait dengan *teaching skill* dari 28 sks (lama) menjadi 42 sks (baru)

⁹⁰ Pedoman Akademik Program Strata I 2013/2014 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2. Menghilangkan tumpang tindih isi mata kuliah yang berbeda dengan cara mengintegrasikan dan menghilangkan mata kuliah
3. Mengurangi jumlah mata kuliah dan jumlah sks dari 74 mata kuliah menjadi 53 mata kuliah, sedangkan jumlah sks lama berjumlah 156 sks dikurangi menjadi 151 sks sehingga rata-rata tiap semester mata kuliah yang ditawarkan menjadi 8 mata kuliah yang sebelumnya 10 sampai 11 mata kuliah
4. Menawarkan mata kuliah pilihan dari 8 mata kuliah (18 sks) yang wajib diambil hanya 4 mata kuliah (8 sks). Dengan demikian jumlah sks yang harus diambil oleh mahasiswa Jurusan/Program Studi PAI minimal 151 sks dengan perincian mata kuliah wajib 143 sks dan mata kuliah pilihan 8 sks dengan kelompok mata kuliah sebagai berikut:

1. Mata Kuliah Umum (MKU)	: 17 sks : 12,26%
2. Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK)	: 42 sks : 27,81%
3. <u>Mata Kuliah Keahlian (MKK)</u>	<u>: 92 sks : 60,92%</u>
Total	: 151 sks

Sedangkan pembagian kelompok mata kuliah berdasarkan kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Mata Kuliah Kompetensi Utama	: 121 sks : 80,13%
2. Mata Kuliah Kompetensi Pendukung	: 24 sks : 15,89%
3. <u>Mata Kuliah Kompetensi Lain</u>	<u>: 6 sks : 3,97%</u>
Jumlah	: 151 sks

Ada pembaharuan hasil telaah pada workshop kurikulum 2014 dengan menjadikan mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam menjadi Filsafat Pendidikan Islam, Bimbingan dan Konseling PAI menjadi salah satu mata kuliah pilihan yang semula wajib, penambahan mata kuliah Analisis Materi PAI sebagai mata kuliah wajib dan menambahkan mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas sebagai mata kuliah pilihan.⁹¹

⁹¹ Laporan Workshop Kurikulum berbasis KKNi FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Juli 2014

Struktur Kurikulum dan Beban Mata Kuliah⁹²

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	DIK 3003	Landasan Pendidikan	3
2	SAR 3005	Fiqh I	3
3	DIK 3069	Pendidikan Kewarganegaraan	2
4	MAT 3028	Matematika Dasar	2
5	BHS 3007	Bahasa Indonesia	2
6	BHS 3005	Bahasa Arab	4
7	BHS 3008	Bahasa Inggris	4
8	SOS 3027	Sosiologi Pendidikan	2
9	QUR 3043	Tafsir	3
10	HAD 3006	Hadis	3
11	SAR 4019	Fiqh II	3
12	AKI 4004	Aqidah	3
13	SEJ 3017	Sejarah Peradaban Islam	3
14	DIK 4093	Psikologi Pendidikan	3
15	DIK 4006	Belajar dan pembelajaran	2
16	SAR 4005	Fiqh III	3
17	AKI 4004	Ilmu Kalam	3
18	AKH 4002	Akhlak	3
19	QUR 4061	Ulumul Qur'an	3
20	HAD 4050	Ulumul Hadis	3
21	SAR 4072	Ushul Fiqh I	3
22	DIK 4047	Media Pembelajaran	3
23	DIK 4076	Pengantar Kurikulum	2
24	QUR 4057	Tafsir Tarbawi	3
25	HAD 4025	Hadis Tarbawi	3
26	SAR 4071	Ushul Fiqh II	3
27	STA 5013	Statistik Pendidikan	3
28	DIK 4002	Administrasi Pendidikan	2
29	DIK 5104	Strategi Pembelajaran	3
30	DIK 5103	Evaluasi Pembelajaran	3
31	SAG 4053	PPMDI	3
32	ABI 5023	Metodologi penelitian Pendidikan	3
33	DIK 510521	Telaah Kurikulum	3
34	DIK 5200	Filsafat Pendidikan Islam	2
35	DIK 5162	Perencanaan Pembelajaran	3
36	PSI 4073	Psikologi Agama	2
37	AKH 4003	Tasawuf	3
38	SAR 4049	Perbandingan Mazhab	3

⁹² Pedoman Akademik Program Strata I 2013/2014 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Laporan Workshop Kurikulum berbasis KKNI FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Juli 2014

39	SEJ 4100	Sejarah Pendidikan Islam	3
40	FIL 5028	Logika/Mantiq	2
41	DIK 5191	Pengembangan Profesi Keguruan	2
42	DIK 5091	Pengajaran Micro	3
43	SAR 5034	Masail Fiqhiyyah	2
44	SAR 5078	Qawaid Fiqhiyyah	3
45	BHS 5029	Qiraatul Kutub	3
46	FIL 5040	Filsafat Islam	3
47	DIK 510522	Analisis Materi PAI	3
48	PSI 4003	Bimbingan Konseling PAI*	2
49	BHS 5008	Teknik Penyunting Naskah*	2
50	HAD 5047	Takhrij al-Hadis*	2
51	DIK 5029	Pendidikan Nilai*	2
52	KOM 4009	Public Speaking*	2
53	DIK 5072	Enterprenership*	2
54	EKO 5030	Penelitian Tindakan Kelas*	2
55	SEN 4003	Khat Arabi*	2
56	ABI 7069	PPKT	6
57	ABI 7042	Skripsi	6

B. Isu Strategis Pengembangan FITK UIN Jakarta

Semua jurusan atau prodi yang ada di FITK termasuk jurusan/prodi PAI pada dasarnya berlandaskan kepada isu strategi dan strategi pengembangan yang termuat dalam renstra Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rumusan Isu-Isu strategis FITK UIN Jakarta berdasarkan hasil evaluasi diri dan isu strategis pendidikan tinggi yang tercantum dalam rumusan HELTS. Ada 10 isu strategis yang dihadapi fitk dakam rentang waktu 5 tahun ke depan (2010 – 2015) dalam upaya mencapai sasaran memperkuat kultur dan reputasi akademik di tingkat fakultas serta adanya pengakuan dunia internasional terhadap eksistensi FITK UIN Jakarta. Untuk memcapai sasaran tersebut ada beberapa isu strategis yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan program FITK 5 tahun ke depan. Isu-isu tersebut antara lain :

1. Pencitraan Fakultas

- a. Mengembangkan kewibawaan dan keberadaan FITK UIN jakarta sebagai salah satu LPTK yang telah diperluas mandatnya untuk menyelenggarakan kegiatan akademik dan penyiapan tenaga pendidik

secara professional, unggul, dan kompetitif dengan proaktif menyelenggarakan pertemuan ilmiah, pangkalan (*house* atau *home based*) berbagai organisasi profesi, pusat-pusat penelitian, dan kelompok-kelompok kajian iptek dan budaya.

- b. Mengembangkan pusat-pusat penelitian dan pusat informasi pendidikan sehingga mampu membawa lembaga menjadi institusi terdepan dalam bidang pendidikan (*opinion leader in education*) melalui kerjasama dengan instansi terkait baik lokal, nasional, maupun internasional yang kemudian dipublikasikan dalam berbagai jurnal, terbitan, atau berita ilmiah lainnya.
- c. Membangun opini positif masyarakat dan pemerintah daerah tentang keberadaan universitas dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari universitas, baik dalam pendanaan berbagai program kegiatan maupun dalam proyek-proyek ilmiah dan kemasyarakatan lainnya.
- d. Mengoptimalkan penataan lingkungan fakultas sehingga menampilkan wajah kampus yang tertata apik, nyaman dan hijau, sehingga memberi kesan berwibawa dan dikelola secara professional menuju administrasi modern.
- e. Meningkatkan kegiatan akademik dan professional pada taraf nasional dan internasional untuk mengangkat nama lembaga di kalangan profesional, pemerintah, dunia usaha, industri, dan masyarakat umum lainnya.
- f. Mengkonsolidasikan dan menegaskan kembali komitmen lembaga pada ilmu pendidikan yang tetap akan terus dipelihara dan dikembangkan lembaga pendidikan tinggi ini dengan proaktif mencari solusi terhadap segala permasalahan pendidikan dan persekolahan.
- g. Mengaktifkan dan menumbuhkembangkan minat dan perhatian kelompok keahlian dan spesialisasi agar muncul gerakan, ide dan gerakan pembaharuan pendidikan dan kemasyarakatan lainnya.

2. Peningkatan mutu Lulusan
 - a. Meningkatkan komitmen layanan perkuliahan yang dilakukan dosen FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
 - b. Melakukan evaluasi perkuliahan yang dilakukan oleh dosen FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
 - c. Pelaksanaan audit mutu akademik yang dilakukan secara periodik.
3. Peningkatan kultur akademik

Kultur akademik adalah satu kondisi yang harus terbentuk di dalam lembaga pendidikan tinggi sebagai sebuah tradisi yang berjalan secara natural oleh seluruh civitas akademika yang ada. Kultur akademik ini sangat berkaitan dengan pengembangan sebuah ilmu pengetahuan. Di dalam kultur akademik para dosen mengenyampingkan interes politik mereka, memomorduakan kepentingan kelompok dan golongan dan berslogan bahwa ilmu jauh lebih penting ketimbang harta dan kedudukan. Salah satu cara yang harus dikembangkan FITK UIN Jakarta untuk menciptakan kultur akademik tersebut antara lain : Bagaimana meningkatkan atmosfer akademik yang kondusif, kreatif, dan produktif termasuk pembiasaan kerja yang terstandar serta pengembangan kepribadian ilmiah dan profesional pada diri dosen dan mahasiswa.

B. STAIN Manado

1. Gambaran Umum STAIN Manado

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado adalah satu-satunya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Sulawesi Utara yang didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tanggal 21 Maret 1997 bertepatan dengan Tanggal 12 Dzulqaidah 1417 H. STAIN Manado merupakan hasil pengembangan Fakultas Syariah IAIN Ujung Pandang di Manado. STAIN Manado diproyeksikan untuk menyiapkan tenaga-tenaga ahli dalam bidang agama Islam utamanya (Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syari'ah, Ekonomi Syari'ah, Pendidikan Agama Islam, Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan

Bahasa Arab, Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Sosiologi Agama dan Sejarah Kebudayaan Islam) sesuai dengan prodi yang sementara dibina saat ini, serta terampil dan berwawasan luas sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan yang begitu pesat.

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 STAIN Manado dinyatakan sebagai Perguruan Tinggi yang statusnya sejajar dengan perguruan tinggi Negeri di seluruh Indonesia. Keputusan tersebut secara langsung telah memberi hak otonomi yang luas bagi STAIN Manado mengembangkan diri sesuai dengan visi dan misinya.

2. Dasar dan Alur Perencanaan Strategis

a. Visi

Visi yang diusung oleh STAIN Manado adalah : Terdepan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban yang islami.

b. Misi :

Misi yang diemban STAIN Manado adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih optimal
- b. Menciptakan kerjasama dengan Sekolah Tinggi dengan lembaga-lembaga lain
- c. Mengembangkan kurikulum yang relevan sesuai dengan kebutuhan pasar yang efektif dan efisien.
- d. Menciptakan iklim kampus yang kondusif, sehat, sejahtera, komunikatif, dan islami, serta
- e. Memberikan kontribusi bagi pembangunan dan masyarakat melalui penelitian dan pengabdian.

d. Tujuan :

1. Menyiapkan peserta didik menjadi masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan /atau menciptakan ilmu pengetahuan agama Islam, IPTEK, dan seni yang bernafaskan Islam

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan agama Islam, IPTEK dan seni yang bernafaskan Islam, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.⁹³

d. Sasaran dan strategi pencapaiannya

1. Menghasilkan lulusan sarjana STAIN yang mampu berkiprah dan sanggup memenuhi tuntutan dunia kerja, baik di bidang pendidikan, sosial, maupun agama.
2. Meyesuaikan sistem dan kebijakan pendukung penyelenggaraan pendidikan dalam pengembangan teknologi pembelajaran.
3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi bagi lembaga dan masyarakat setiap tahunnya.
4. Melakukan pemutakhiran hasil penelitian yang telah ada dalam rangka peningkatan kualitas penelitian.
5. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkala.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah di uraikan di atas adalah:

1. Mengembangkan dan melakukan revisi kurikulum pendidikan berbasis kompetensi.
2. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dosen melalui studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, pelatihan workshop dan seminar;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dalam proses perkuliahan;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses perkuliahan dan penelitian;

⁹³ STATUTA STAIN Manado 2012

5. Menjalin kerjasama dengan program studi lain dan perguruan tinggi lain, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional.
6. Melakukan survey lapangan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terhadap lulusan sarjana STAIN
7. Melakukan monitoring dan mengevaluasi hasil pengabdian pada masyarakat.

Struktur organisasi STAIN Manado terdiri dari ketua dan dibantu oleh 3 (tiga) orang wakil ketua: (a) wakil ketua bidang akademik dan pengembangan lembaga, (b) wakil ketua bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan (c) wakil ketua bidang kemahasiswaan dan kerjasama

Ketua mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta membina Dosen, Tenaga Penunjang Akademik, Tenaga Penunjang Non Akademik, Mahasiswa dan seluruh unsur-unsur yang berada di STAIN Manado.

Wakil Ketua I bidang Akademik dan pengembangan lembaga yang mempunyai tugas pokok membantu ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta memimpin pelaksanaan kegiatan pada Bagian Akademik dan Kemahasiswaan serta Jurusan/Prodi.

Wakil Ketua II bidang Administrasi Umum, perencanaan dan keuangan mempunyai tugas pokok membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi dan bidang umum yang akuntabel dan transparan. Wakil ketua II bertanggung jawab terhadap pengembangan lembaga, mengelola peningkatan mutu, mengelola keuangan, dan sumber daya manusia.

Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan dan kerjasama mempunyai tugas pokok membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang Kemahasiswaan dan kerjasama. Wakil Ketua III juga bertanggung jawab untuk membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga terjadi kesinambungan antara lapangan kerja dengan lulusan STAIN Manado.

STAIN Manado mempunyai tiga (3) jurusan yang merupakan satuan pelaksana pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat: Jurusan

dipimpin oleh ketua jurusan dengan dibantu oleh seorang Sekretaris jurusan dan staff. Kecuali untuk jurusan Ushuluddin, yang ada hanya ketua jurusan tanpa sekretaris dan staff.

Selanjutnya, STAIN Manado juga mempunyai Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (P3M). Lembaga penelitian merupakan unsur pelaksanaan yang mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh pusat penelitian dan kegiatan-kegiatan penelitian lainnya, serta ikut mengusahakan dan mengendalikan sumber daya yang diperlukan. Lembaga penelitian dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris. Lembaga Penelitian dilengkapi dengan tenaga ahli dan tenaga administrasi.

STAIN Manado juga memiliki lembaga yang terdiri dari:

- a) Unit Pelaksanaan Tugas (UPT) Pustaka,
- b) Unit Pusat Penjamin Mutu (P2MP)
- c) Unit Pengembangan Bahasa
- d) Unit Informasi Teknologi dan Pangkalan Data

Masing-masing unit/ pusat tersebut dipimpin oleh seorang ketua/kepala dan dibantu oleh beberapa staff.

Untuk mendukung dan melaksanakan administrasi, STAIN Manado memiliki :

- (a) Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan alumni
- (b) Bagian Administrasi Umum, kepegawaian, Arsip dan Hubungan Masyarakat
- (c) Bagian Perencanaan, Keuangan, dan akuntansi

3. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)

a. Visi:

Visi Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah STAIN Manado adalah : Terdepan dalam pengembangan ilmu dan keterampilan keguruan bidang studi Pendidikan Agama Islam (PAI)

b. Misi:

Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah STAIN Manado mengemban misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran (perkuliahan) yang unggul, interaktif, holistik, integratif, saintifik (berbasis riset), kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, yang berpusat pada mahasiswa dalam bidang Pendidikan Agama Islam.
- b. Mengembangkan program kajian, riset dan kegiatan keilmuan dalam bidang pendidikan agama islam secara komprehensif sesuai dengan dinamika masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menjadi pusat kajian yang kredibel di tingkat nasional dan internasional.
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam rangka memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan masyarakat melalui kajian dan langkah-langkah inovatif melalui Pendidikan Agama Islam secara tepat.
- d. Menjalin kerjasama kemitraan dengan lembaga pendidikan dan pihak terkait lainnya dalam skala lokal, nasional dan internasional

c. Tujuan

Program Studi Pendidikan Agama Islam menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan:

- a. memanfaatkan ilmu pengetahuan agama islam sesuai dengan perkembangan IPTEKS di berbagai jalur, jenis, dan jenjang organisasi penyelenggara pendidikan;
- b. Penguasaan konsep-konsep teoritis dalam bidang pendidikan agama islam secara mendalam,
- c. memformulasikan penyelesaian masalah yang terkait dengan pemahaman agama islam pada peserta didik di berbagai jalur, jenis, dan jenjang organisasi penyelenggara pendidikan secara prosedural;
- d. mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data serta memberikan berbagai alternatif solusi dalam bidang pendidikan agama islam, di berbagai jalur, jenis, dan jenjang organisasi pelayanan/penyelenggara pendidikan;

- e. beradaptasi dan bertanggungjawab pada bidang pekerjaan sebagai pendidik bidang pendidikan agama islam, di berbagai jalur, jenis, dan jenjang organisasi pelayanan pendidikan;
- f. melaksanakan tugas-tugas kependidikan islam pada lembaga pendidikan berlandaskan nilai-nilai Islami di berbagai jalur, jenis, dan jenjang organisasi pelayanan pendidikan;
- g. Memiliki kemampuan mengelola lembaga pendidikan pada lembaga pendidikan formal dan non formal;

d. Profil Lulusan

1. Utama

Menjadi Pendidik Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah tingkat dasar dan menengah, berkepribadian yang baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidang pendidikan agama serta mampu menerapkan teori-teori pendidikan dan pembelajaran.

2. Tambahan (dipilih)

- a. Peneliti Pendidikan Agama Islam
- b. Guru BK di Sekolah dan Madsarah
- c. Guru Mata Pelajaran PAI Madrasah (Al-Qur'an Hadits, SKI, Fikih, Ushul Fikih, Akidah Akhlak)
- d. Pengembang sumber belajar PAI

e. Kualifikasi Prodi Pendidikan Agama Islam

- a) Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
- b) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

- c) Mampu mengambil keputusan strategis Berdasarkan analisis informasi dan data,
- d) dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai Alternative solusi
- e) Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberitanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

f. Rumusan Capaian Pembelajaran

1) Rumusan Sikap Umum

Setiap lulusan program pendidikan akademik, vakasi, spesialis, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut :

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada bangsa dan negara
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
- 6) Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan

2. Rumusan Sikap Khusus

Lulusan program sarjana Pendidikan Agama wajib memiliki sikap khusus sebagai berikut :

1. Bersikap inklusif, bertindak obyektif serta tidak deskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisifisik, latarbelakang keluarga dan status social ekonomi.
2. Menunjukkan etoskerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga dan cinta menjadi guru dan rasa percayadiri.
3. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang pendidikan agama Islam secara mandiri
4. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam.

3. Rumusan Pengetahuan Umum

Lulusan program sarjana Pendidikan Agama Islam wajib memiliki pengetahuan umum sebagai berikut :

1. Memiliki Pengetahuan tentang filsafat, pancasila, kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan
2. Memiliki kemampuan penguasaan dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja
3. Memiliki kemampuan penguasaan dalam berfikir kritis, logis dan sistematis.

4. Rumusan Pengetahuan Utama

Lulusan program sarjana Pendidikan Agama Islam wajib memiliki pengetahuan utama sebagai berikut :

1. Memiliki kemampuan dalam penguasaan berbagai teori pembelajaran PAI di sekolah/madrasah terkait dengan pengelolaan pembelajaran yang mendidik, kreatif, inovatif, produktif, saintifik dan adaptif.
2. Kemampuan memahami landasan pendidikan umum dan Islam, perkembangan peserta didik, pengembangan kurikulum, landasan

- pembelajaran, pengembangan perangkat pembelajaran, penilaian pembelajaran, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, kemampuan stimulasi peserta didik dalam pengembangan potensi diri dan mengaktualisasikannya secara tepat
3. Kemampuan dalam penguasaan pengetahuan bidang keilmuan PAI secara luas dan mendalam berkaitan dengan konsep, filosofi, metode disiplin keilmuan (body of knowledge) PAI dan relevan dengan tuntutan standar isi satuan pendidikan.
 4. Menguasai analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam bidang penelitian pendidikan agama Islam
 5. Menguasai berbagai teori Bimbingan Konseling dan menerapkannya untuk mengatasi permasalahan kehidupan beragama siswa di sekolah/madrasah.
 6. Menguasai pengetahuan yang terkait dengan pengembangan media dan sumber belajar PAI
 7. Menguasai kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan sebagai dasar penyelenggaraan PAI.

5. Rumusan Pengetahuan Utama

Lulusan program sarjana Pendidikan Agama Islam wajib memiliki pengetahuan utama sebagai berikut :

1. Memiliki kemampuan dalam penguasaan berbagai teori pembelajaran PAI di sekolah/madrasah terkait dengan pengelolaan pembelajaran yang mendidik, kreatif, inovatif, produktif, saintifik dan adaptif.
2. Kemampuan memahami landasan pendidikan umum dan Islam, perkembangan peserta didik, pengembangan kurikulum, landasan pembelajaran, pengembangan perangkat pembelajaran, penilaian pembelajaran, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, kemampuan stimulasi peserta

didik dalam pengembangan potensi diri dan mengaktualisasikannya secara tepat

3. Kemampuan dalam penguasaan pengetahuan bidang keilmuan PAI secara luas dan mendalam berkaitan dengan konsep, filosofi, metode disiplin keilmuan (*body of knowledge*) PAI dan relevan dengan tuntutan standar isi satuan pendidikan.
4. Menguasai analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam bidang penelitian pendidikan agama Islam
5. Menguasai berbagai teori Bimbingan Konseling dan menerapkannya untuk mengatasi permasalahan kehidupan beragama siswa di sekolah/madrasah.
6. Menguasai pengetahuan yang terkait dengan pengembangan media dan sumber belajar PAI
7. Menguasai kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan sebagai dasar penyelenggaraan pai.

6. Rumusan Pengetahuan Khusus

Lulusan program sarjana Pendidikan Agama wajib memiliki pengetahuan khusus sebagai berikut :

1. Menguasai hafalan ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan kajian PAI di sekolah/madrasah.
2. Menguasai kemampuan pemahaman teks berbahasa Arab dan Inggris yang berkaitan dengan kajian PAI
3. Menguasai dasar-dasar ilmu keislaman.
4. Menguasai teori-teori pendidikan multikultural untuk penyelenggaraan PAI

7. Rumusan Keterampilan Umum

Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut :

- 1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu

- pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
- 2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur
 - 3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni
 - 4 Menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
 - 5 Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penjelasan masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data
 - 6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
 - 7 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
 - 8 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
 - 9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi

8. Rumusan Keterampilan Khusus

Lulusan program sarjana Pendidikan Agama wajib memiliki keterampilan khusus sebagai berikut:

1. Mampu berkomunikasi menggunakan bahasa asing (Arab dan Inggris)
2. Mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mengkomunikasikan ajaran-ajaran keislaman
3. Terampil menganalisis persoalan-persoalan keilmuan dan kemasyarakatan
4. Menyusun deskripsi saintifik, hasil kajian PAI dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
5. Memiliki keterampilan menerapkan kompetensi pedagogis, profesional, keberibadian dan social di sekolah/madrasah.⁹⁴

f. Pokok-Pokok Kajian/Substansi Bidang Kajian

Bahan kajian adalah suatu bangunan ilmu, obyek yang dipelajari, yang menunjukkan ciri cabang ilmu tertentu, atau dengan kata lain menunjukkan bidang kajian atau inti keilmuan suatu program studi. Pilihan bahan kajian ini sangat dipengaruhi oleh visi keilmuan program studi yang biasanya diambil dari program pengembangan PS.

Berikut bahan kajian dari PS PAI :

⁹⁴ Laporan Workshop Review Kurikulum Prodi PAI Oktober 2014

No.	KODE	MATA KULIAH	SMT	SKS
1	STI 101	Bahasa Inggris I	I	3
2	STI 102	Bahasa Arab I	I	3
3	STI 103	Bahasa Indonesia	I	3
4	STI 105	Metode penelitian I	I	2
5	STI 106	Komputer	I	3
6	STI 104	IAD/IBD/ISD	I	3
7	STI 107	Bahasa Inggris II	II	3
8	STI 108	Bahasa Arab II	II	3
9	STI 109	Pendidikan Kewarganegaraan	II	3
10	STI 110	Filsafat Ilmu	II	3
11	STI 111	Metode Studi Islam	II	3
12	TAR 112	Dasar-Dasar Kependidikan	II	2
13	STI 113	Ulumul Quran	II	2
14	STI 214	Ushul Fiqh	III	3
15	TAR 215	Ilmu Pendidikan Islam	III	3
16	STI 216	Ulumul Hadis	III	3
17	STI 217	Ilmu Tafsir	III	3
18	STI 218	Ilmu Kalam	III	3
19	TAR 219	Statistik Pendidikan I	III	2
20	STI 220	Sejarah Peradaban Islam	III	3
21	TAR 221	Filsafat Pendidikan	III	3
22	STI 222	Metode Penelitian II	IV	3
23	TAR 223	Statistik Pendidikan II	IV	3
24	STI 224	Fiqh I	IV	3
25	STI 225	Hadis	IV	3
26	STI 226	Tafsir	IV	3
27	TAR 227	Psikologi Pendidikan	IV	3
28	TAR 228	Sosiologi Agama	IV	3
29	TAR 229	Teknologi Pendidikan	IV	3
30	TAR 330	Hadis Tarbawi	V	3
31	TAR 331	Tafsir Tarbawi	V	3
32	STI 332	Fiqh II	V	3
33	TAR 333	Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam I	V	2
34	TAR 334	Manajemen Pendidikan	V	3
35	TAR 335	Perencanaan Pembelajaran	V	3
36	STI 336	Akhlaq Tasawuf	V	3
37	TAR 337	Strategi Pembelajaran I	V	3
38	TAR 338	Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam II	VI	3
39	TAR 339	Pengembangan Kurikulum PAI	VI	3
40	TAR 340	Evaluasi Pendidikan	VI	3
41	TAR 341	Sosiologi Pendidikan	VI	3
42	TAR 342	Bimbingan dan Konseling	VI	3
43	TAR 343	Strategi Pembelajaran II	VI	3
44	TAR 444	PPL I	VII	3
45	TAR 445	PPL II	VII	6
46	STI 446	Kuliah Kerja Nyata	VIII	4
47	STI 447	Ujian Akhir Program Studi / Komprehensif	VIII	3
48	STI 446	Skripsi	VIII	6
Jumlah				146

C. Implementasi Pendidikan Multikultural

Paling tidak ada lima pilar utama harus ditegakkan dalam pendidikan multikultural:

1. Adanya integrasi kurikulum pendidikan yang menempatkan keanekaragaman dalam satu kultur pendidikan. Kurikulum di sini bisa bermakna bahwa pendidikan multikultural disisipkan di semua mata pelajaran sebagai model.
2. Konstruksi pengetahuan yang diwujudkan dengan mengetahui dan memahami secara komprehensif atas keberagaman yang ada. Dengan melihat keberagaman yang ada, maka kesadaran tersebut dibangun dalam pengetahuan bersama.
3. Pengikisan prasangka dan berbagai stigma negatif yang lahir dari interaksi antar elemen keberagaman dalam kultur pendidikan. Pendidikan harus dibangun berbasis pikiran positif, karena interaksi antar komponen masyarakat sekolah / akan terganggu ketika ada prasangka buruk yang merusak.
4. Ada paradigma kesetaraan yang memberi ruang dan kesempatan yang sama kepada setiap elemen pendidikan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan *millenium* yaitu *education for all* (pendidikan untuk semua).

Di masa depan berdasarkan kelima pilar inilah segala bentuk perilaku rasisme dan tindakan diskriminasi di sekolah dan masyarakat tidak akan mendapat ruang gerak dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jika pendidikan multikultural ini berhasil diimplementasikan di seluruh tanah air maka tidak akan ada lagi perilaku *bullying*, diskriminatif dan eksploitatif atau kekerasan terhadap orang atau kelompok yang berbeda, baik berbeda atas dasar etnis, suku, agama, kepercayaan, maupun berbeda karena alasan ideologis, politis dan teologis.⁹⁵

⁹⁵ Musdah Mulia, *Pendidikan Multikulturalisme* dalam wacana-pendidikan-multikultural-di-Indonesia. Diakses tanggal 28 September 2014

Dalam perspektif pendidikan multikultural seorang guru atau dosen tidak hanya dituntut untuk mampu mengajar secara profesional, tetapi juga diharapkan mampu mentransformasikan nilai-nilai keberagaman yang toleran. Dengan langkah seperti ini *outputnya* diharapkan mampu menghargai keberadaan para pemeluk agama yang berbeda dengan dirinya. Dalam cara pandang seperti ini guru atau dosen juga merupakan target dari strategi pendidikan multikultural. Apabila ia mempunyai pemahaman keberagaman yang toleran dan terbuka, ia juga akan mampu mengajarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman yang toleran dan terbuka, ia juga akan mampu mengajarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman tersebut terhadap anak didiknya.⁹⁶

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah kurikulum, silabus, dan buku ajar. Dalam perspektif pendidikan multikultural, buku ajar untuk mahasiswa harus memuat nilai-nilai demokrasi, pluralisme, kesetaraan, dan inklusivisme. Dalam hal kurikulum dan silabus, konsep pendidikan multikultural juga menuntut hal yang sama.

Dalam mengkaji komponen kurikulum, pertanyaan yang paling mendasar yang patut dikemukakan terlebih dahulu adalah apa dasar dan tujuan pendidikan multikultural di perguruan tinggi. Jawaban terhadap pertanyaan ini akan tercermin dari visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan, program lembaga, struktur kurikulum, dan program pembelajaran yang dirumuskan.

Menurut Tilaar, sebagaimana yang dikutip oleh Yani Kusmarni menyatakan bahwa model kurikulum yang dapat digunakan dalam pendidikan multikultural mencakup kurikulum yang resmi dan *the hidden curriculum*, yakni kurikulum tidak tertulis dan terencana tetapi proses internalisasi nilai dan keterampilan justru terjadi di kalangan peserta didik. Dalam kurikulum resmi pendidikan multikultural sebaiknya diintegrasikan ke semua mata pelajaran dan

⁹⁶ Dody S.Truna, *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme: Telaah Kritis atas Muatan Pendidikan Multikulturalisme dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), h. 64

kegiatan lintas kurikulum. Sebaiknya wawasan multikulturalisme tidak dimasukkan sebagai beban tambahan sebagai mata pelajaran baru.⁹⁷

Pendidikan multikultural di Indonesia hendaknya dilakukan dengan memperhatikan perspektif pengelolaan pluralisme budaya yang ada di masyarakat yang pada tataran teoritik terdapat dua perspektif:

1. Pendekatan *convensionalism* yang mengakui keanekaragaman identitas budaya. Dalam hal ini masing-masing entitas budaya diberi hak membawa simbol-simbol dan lambang yang mereka miliki ke ranah publik. Konsep kesatuan dalam hal ini distruktur oleh keragaman budaya atau yang dikenal dengan *unity in diversity*.
2. Perspektif *deconvensionalism* yang dalam hal ini harus ada penataan pengelolaan simbol-simbol askriptif di ruang publik. Simbol dan lambang-lambang yang direpresentasikan identitas atau budaya partikular tidak boleh dibawa ke ranah publik. Dalam interelasi dengan publik hanya diperbolehkan memakai lambang atau simbol-simbol bersama. Konsep kesatuan kemudian dikenal dengan *unity without diversity*.

Unity in diversity menjadi perspektif yang tepat dalam menerapkan pendidikan multikultural di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena masyarakat Indonesia yang bahkan sebelum terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah terdiri dari masyarakat yang berbeda-beda, baik secara horizontal (perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat

Pendidikan multikultural pada awalnya merupakan gerakan reformasi pendidikan di Amerika Serikat karena adanya diskriminasi etnis dan kultur oleh etnis dan kultur WMPA (White – Male – Protestant –Anglo Saxon). Oleh karena itu untuk menerapkan pendidikan multikultural di Indonesia haruslah hati-hati, tepat, dan bijaksana karena belum tentu sama dengan Amerika.

Jika pendekatan pendidikan multikultural akan diimplementasikan di Indonesia, haruslah berdasarkan realita Indonesia dan kearifan lokal dengan memperhatikan karakteristik bangsa dan budaya sendiri. Ciri-ciri khas etnis

⁹⁷ Yani Kusmarni, *Pendidikan Multikultural, Suatu Kajian Tentang Pendidikan Alternatif di Indonesia Untuk Merekatkan Kembali Nilai-Nilai Persatuan, Kesatuan, dan Berbangsa di Era Global* dalam <http://www.kompas.com>. Diakses tanggal 28 September 2014

Indonesia jika dilihat dalam perbandingan dengan konteks pendidikan multikultural ala Amerika Serikat adalah:

Pertama, Kebudayaan Indonesia dari sisi yang statis tentang multikulturalisme bukan kulturnya dapat dikategorisasikan menjadi :

1. *Isolated Culture*, kebudayaan yang hidup tersendiri tidak berinteraksi kuat dengan kebudayaan lain, sebagian karena batas-batas geografis
2. *Cosmopolitan multuculture*, kebudayaan yang berbaur menjadi satu, kadang tanpa batas, sehingga “anggota kelompok” (etnis, sunetnis atau suku bangsa) sudah tidak terlampau peduli dengan kebudayaan dan nilai-nilainya sendiri
3. *Accomodative culture*, kebudayaan yang ada di suatu daerah di mana ada kebudayaan “subetnis” yang dominan (diikuti mayoritas penduduk), tetapi ada juga kebudayaan subetnis lain, yang bisa hidup bersama tanpa gesekan apapun dan tanpa ada diskriminasi apapun.

Kebudayaan tipe pertama, kebudayaan yang terisolasi (karena geografis, menjadi kedaerahan) paling banyak terdapat di Indonesia, karena penduduk tidak asli daerah yang berpindah ke daerah tersebut pun relatif sedikit, dan kadang menjadi *isolated* juga karena terkonsentrasi di daerah tertentu (pemukiman trans misalnya). Kebudayaan tipe kedua terdapat di berbagai kota besar di Indonesia karena penduduknya campur baur dari beragam suku-bangsa dan etnis/subetnis. Kebudayaan tipe ketiga terutama terdapat di pulau Jawa karena banyak suku bangsa dan penduduk dengan asal usul etnis yang tinggal menetap sebagai penduduk “asli” dari hasil perkawinan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Ini tidak menutup diri dari bahwa kebudayaan daerahpun bersifat akomodatif.

Kedua, dari sisi yang dinamis, sejak proklamasi kemerdekaan yang didahului oleh Sumpah Pemuda telah terikrarkan dari sanubari seluruh bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia itu “*satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan nasional*”. Kesatubangsaan itu benar-benar mencakup seluruh orang Indonesia dari manapun asalnya. Sebagai perbandingan, Sumpah Pemuda Indonesia itu jauh berbeda nuansanya dengan konstitusi Amerika Serikat. Sebutan pemuda dalam sumpah itu benar-benar menunjukkan semua pemuda Indonesia.

Sumpah Pemuda Indonesia mencerminkan seluruh pemuda Indonesia, bahkan seluruh rakyat Indonesia, lewat perjalanan sejarah, bukan pemuda atau rakyat Indonesia tertentu saja.⁹⁸

Di Indonesia, etnis selain etnis Indonesia relatif kecil jumlahnya, dan jika ada konsentrasi hanya di beberapa wilayah tertentu saja. Perbedaan etnis itupun sebenarnya lebih hanya sebagai warisan penjajahan Belanda yang secara sengaja diskriminatif untuk keperluan politisnya. Itulah sebabnya di Indonesia lebih dikenal adanya *multisubetnis* yang disebut **suku bangsa** dari pada *multi-etnis*. Suku bangsa itupun tidak terlampau mencolok perlakuannya dilihat dari ras, lebih-lebih dilihat dari budaya dan bahasanya. Itupun kerap sudah membaur karena perkawinan. Ada perbedaan ras memang, tetapi tidak pernah ada perlakuan khusus terkait dengan ras, perlakuan lebih pada daerahnya, sehingga tetap disebut suku bangsa dari bangsa Indonesia.

Oleh karena tidak ada etnis berbeda yang besar-besar, maka di Indonesia juga tidak dikenal multikultur berbasis etnis yang ada sebenarnya subkultur. Semuanya kendati dalam keanekaragaman atau bhinneka, merupakan budaya Indonesia. Jadi budaya Sunda dan budaya Jawa misalnya, semuanya budaya Indonesia. Bahkan budaya Cina dan Arab pun yang ada di Indonesia, diakui sebagai budaya Indonesia. Qasidah atau nasyid yang asalnya dari Arab, lazim dianggap budaya kelompok Muslim Indonesia.

Yang lebih sensitif di Indonesia sebenarnya *multireligi* bukan multikultur. Benturan antar pemeluk agama, bahkan antar penganut mazhab, aliran, atau sekte dalam satu agamapun bisa terjadi. Faktornya pun beragam, sebagian kadang karena ada kepentingan politik, sebagian karena faktor *in group* dan *out group* yang terlampau kental.

Dalam mengimplementasikan paradigma pendidikan multikultural dituntut berpegang pada prinsip-prinsip diantaranya:

1. Pendidikan multikultural harus menawarkan beragam kurikulum yang mempresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang

⁹⁸ Tatang M. Amirin, *Implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Kontesual Berbasis Kerajinan Lokal di Indonesia*, dalam *Jurnal Pembangunan Pendidikan : Fondasi dan Aplikasi* di akses tanggal 28 September 2014

2. Pendidikan multikultural harus didasarkan kepada asumsi bahwa tidak ada penafsiran yang tunggal terhadap kebenaran sejarah
3. Kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda
4. Pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinsip pokok dalam memberantas pandangan khas tentang ras

Menerapkan pendidikan multikultural di Indonesia tidaklah mudah. Lamanya zaman orde baru berkuasa telah menanamkan keragaman yang sentralitas dengan pengawalan yang ketat terhadap isu perbedaan antar masyarakat.

Dimensi pendidikan multikultural dalam kurikulum

No	Dimensi	Sub dimensi	Indikator
1	<i>Content integration</i> (integrasi materi)	1. Budaya 2. Sastra 3. Realitas	1. Kurikulum yang dimunculkan menggunakan budaya yang beragam, jangan sampai menonjolkan budaya mayoritas dan mengabaikan budaya minoritas 2. Kurikulum yang digunakan mengintegrasikan sastra dan berbagai budaya yang ada 3. Kurikulum yang digunakan memberikan gambaran mengenai kenyataan multikultural yang ada
2	<i>The knowledge construction process</i> (Proses-proses merekonstruksi pengetahuan)	1. Pemahaman 2. Aplikasi	1. Kurikulum yang digunakan memberikan pemahaman kepada siswa tentang berbagai budaya yang berbeda-beda. 2. Kurikulum yang digunakan memberikan konsep yang membantu siswa untuk berperilaku positif terhadap berbagai budaya yang berbeda
3	<i>An Equity Pedagogy</i>	1. Individu	1. Kurikulum yang digunakan mengarahkan pada penggunaan

	(Penyesuaian metode pembelajaran)	2. Kelompok	metode yang mampu membantu setiap individu siswa dalam proses pendidikan multikultural 2. Kurikulum yang digunakan mengarahkan pada penggunaan metode yang mampu membantu setiap siswa untuk bekerja secara kelompok
4	<i>Prejudice reduction</i> (pengurangan prasangka)	1. Agama 2. Suku/ras/etnis 3. Status sosial/ekonomi 4. Keadilan 5. Demokrasi	1. Kurikulum yang digunakan memberikan pemahaman, penghargaan dan penghormatan terhadap berbagai agama yang ada 2. Kurikulum yang digunakan memberikan pemahaman, penghargaan dan penghormatan terhadap berbagai suku yang ada 3. Kurikulum yang digunakan memberikan pemahaman, penghargaan dan penghormatan terhadap berbagai status sosial/ekonomi 4. Kurikulum yang digunakan memberikan pemahaman tentang pentingnya keadilan terhadap berbagai kultur yang ada 5. Kurikulum yang digunakan memberikan pemahaman tentang pentingnya demokrasi atas berbagai perbedaan kultur yang ada.
5	<i>Empowering school culture and social structure</i> (Penguatan budaya sekolah dan struktur sosial)	1. Budaya sekolah 2. Struktur sosial	1. Kurikulum yang digunakan memberikan konsep-konsep yang memungkinkan peserta didik dapat berpartisipasi secara humanis dalam aktivitas di sekolah 2. Kurikulum yang digunakan memberikan konsep-konsep yang memungkinkan peserta didik untuk menganalisis berbagai struktur sosial yang terjadi di masyarakat

--	--	--	--

C.1. Pendidikan Multikultural dalam Kurikulum prodi PAI FITK UIN Jakarta

Setelah mempelajari dan meneliti silabus dari setiap mata kuliah yang ada di prodi Pendidikan Agama Islam Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, maka ditemukan mata kuliah yang mengandung pendidikan multikultural adalah:

1. Pendidikan Kewarganegaraan

Mata kuliah ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945. Pada akhirnya dapat menghayati hakikat konsepsi wawasan nusantara dan Ketahanan Nasional sehingga menjiwai tingkah lakunya selaku warga negara RI yang patriotik dan cinta tanah air dalam melaksanakan profesinya. Dalam mata kuliah ini dibahas esensi pendidikan kewarganegaraan, dinamika negara kebangsaan, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara, kesadaran berkonstitusi, hak asasi dan kewajiban dasar manusia, kesadaran berdemokrasi dan pembangunan daerah dalam kerangka NKRI

2. Masail Fiqhiyyah

Mata kuliah ini meliputi kajian tentang tabungan haji, zakat hasil jasa atau profesi, penyaluran zakat untuk pemugaran dan pembangunan mesjid, pembuatan patung dan monumen, pajak dan zakat, bank dan rente, bank dan *fee*, koperasi, mudharabah, operasi plastik dan ganti kelamin, asuransi jiwa, kebakaran dan lain sebagainya. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mengetahui perbedaan pendapat ulama yang ada dalam masalah yang di kaji.

3. Pengajaran Micro

Tujuan mata kuliah ini adalah untuk meningkatkan berbagai keterampilan mengajar sehingga calon guru mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien dan menarik (pembelajaran yang mendidik). Calon guru diharapkan mampu menganalisis tingkah laku pembelajaran kawannya dan dirinya sendiri, calon guru mampu bertindak profesional.

4. Pengembangan profesi keguruan

Mata kuliah ini membahas tentang sikap, kode etik dan refleksi profesional guru terhadap tugasnya serta membahas deskripsi berbagai jenis profesi, motivasi menjadi tenaga pendidik yang bergerak dalam dunia pendidikan.

5. Sejarah Peradaban Islam

Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa tentang sejarah peradaban Islam dan mampu menganalisa perkembangan Islam sejak zaman klasik, pertengahan dan moderen, memberikan pemahaman tentang kontribusi peradaban Islam dalam perkembangan peradaban dunia, serta membentuk mahasiswa sebagai pribadi yang beriman, bermoral, rasional, dinamis, toleran, dan mampu mengembangkan peradaban Islam, salah satu materi yang mendukung tujuan ini adalah materi realitas masyarakat muslim Indonesia dimana dijelaskan tentang realitas sosial budaya dan solusi serta strategi penanggulangannya.

6. / 7. Ushul Fiqh I dan II

Mata kuliah ini menfokuskan bahasannya pada metode menafsirkan ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an. Ia membahas perihal sumber-sumber hukum baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Karena soal kata merupakan isi pokok dalam ushul fikih, maka pengenalan terhadap jenis-jenis kata dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembentuka hukum Islam penting untuk dibahas. Sebab perbedaan dalam memaknai sebuah kata hampir selalu berujung pada perbedaan produk fikih atau tafsir. Dengan mempelajari beragam pendapat yang ada dalam mata kuliah

ushul fikih diharapkan mahasiswa bisa menghargai pendapat dan karya orang lain.

8. / 9/ 10. Fiqh I,II, dan III

Mata kuliah ini dimaksudkan untuk membekali mahasiswa dengan fikih ibadah, muamalah, perkawinan dan waris yang berguna bagi pelaksanaan ajaran Islam. Metode kajian fikih dalam mata kuliah ini adalah kajian deskriptif fikih mazhab tertentu, kajian analitis berbagai mazhab, kajian perbandingan mazhab-mazhab fikih, sehingga mahasiswa menguasai persoalan-persoalan fikih dan penerapannya dalam Islam yang memungkinkan mereka mengajarkan dan mengembangkan secara mandiri kemampuan fikihnya.

11. Psikologi Pendidikan

Mahasiswa memahami Psikologi Pendidikan sebagai sebuah pendekatan di dalam studi Agama, memahami teori-teori psikologi pendidikan dan perkembangannya serta fenomena psikologi pendidikan. Di antara materi yang dibahas adalah perkembangan Perkembangan pendidikan anak, remaja, dan dewasa, agama dan kesehatan mental.

12. Sosiologi Pendidikan

Mata kuliah ini membahas tentang hakikat konsep, teori, makna sosiologi, pendidikan dan menganalisis sosiologi, terutama dalam bidang pendidikan. Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini antara lain adalah pendidikan dan perubahan sosial, keluarga dan sosialisasi, kelompok sebaya dan sosialisasi, sekolah dan sosialisasi, gender dan sosialisai, dan pendidikan orang dewasa serta pendidikan dan tatanan sosial`

13. Landasan Pendidikan

Mata kuliah ini berisi pengkajian tentang hakikat, landasan, komponen, sistem, aliran-aliran pendidikan di Indonesia. Pendidikan seumur hidup, wajib belajar, pendidikan inklusif dan arah baru dalam pendidikan dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Materi perkuliahan ini diberikan dalam kerangka interkoneksi dan berbasis pada Islam.

14. Akhlak

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami dengan benar pengertian akhlak, objek, kedudukan dan keistimewaan akhlak, akhlak dalam keluarga, akhlak bermasyarakat dan akhlak bernegara. Sehingga mahasiswa bisa mengaplikasikan akhlak mahmudah dalam kehidupan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

15. Belajar dan Pembelajaran

Mata kuliah belajar dan pembelajaran membahas pengertian belajar, hakekat belajar dan pembelajaran, ciri-ciri perubahan tingkah laku, kiat guru dalam memicu siswa belajar, perbedaan individual, motivasi belajar, posisi guru-siswa dalam memperoleh pesan, peran guru dalam proses pembelajaran, mengenal dan mengatasi kesulitan belajar, merancang dan menentukan pendekatan-model-metode-teknik pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan pengembangan kurikulum.

16. Tafsir

Dalam deskripsi mata kuliah ini dapat dilihat, bahwa tujuannya adalah agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami dengan baik pokok-pokok kandungan al-Qur'an dalam bidang akidah dan falsafah kehidupan manusia, menjelaskan proses penciptaan manusia menurut al-Qur'an, menjelaskan pilar-pilar pembinaan masyarakat, menjelaskan secara tematik makna keadilan dan lain sebagainya.

17. Hadis

Mata kuliah ini membahas tentang keutamaan shalat, sikap muslim terhadap agama lain (toleransi beragama) dan perkawinan beda agama. Standar kompetensi dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami dan mengambil pelajaran dari petunjuk-petunjuk Nabi yang berkaitan dengan berbagai aspek yang meliputi ibadah dan pergaulan antar sesama baik muslim maupun non muslim.

C.2. Pendidikan Multikultural dalam Kurikulum prodi PAI STAIN Manado

Setelah mempelajari dan meneliti silabus dari setiap mata kuliah yang ada di prodi Pendidikan Agama Islam, maka mata kuliah yang mengandung pendidikan multikultural adalah :

1. IAD, IBD dan ISD

Dalam Deskripsi mata kuliah IAD, IBD, dan ISD dijelaskan bahwa mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar ilmu alamiah (IAD), Ilmu budaya dasar (IBD) dan Ilmu sosial dasar (ISD). Ilmu alamiah dasar berisi tentang proses perkembangan pola pikir manusia, kelahiran ilmu pengetahuan alam (IPA), Metode Ilmiah, alam semesta dan tata surya. Teori evolusi dan rekayasa reproduksi, ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan manusia. Ilmu Budaya dasar berisi tentang cipta, karsa dan karya manusia dalam berbagai bentuknya yang meliputi : manusia dan cinta kasih, keindahan, manusia dan pandangan hidup, tanggung jawab, manusia dan penderitaan, keadilan serta manusia dan kegelisahan serta harapan. Ilmu sosial dasar berisi tentang konsep dasar bermasyarakat dan permasalahan-permasalahan umum yang ada dalam masyarakat meliputi masalah individu, keluarga dan masyarakat, pemuda dan sosialisasi, negara dan warga negara, pelapisan sosial dan persamaan derajat, masyarakat pedesaan dan perkotaan. Dengan mempelajari dasar-dasar ilmu alam, budaya dan sosial ini diharapkan mahasiswa mampu menjawab dan memecahkan berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan masalah alam, masalah kemanusiaan secara kreatif, maupun masalah sosial.

2. Ilmu Kalam

- Dalam Standar kompetensi mata kuliah ini dijelaskan bahwa mahasiswa memiliki pengetahuan yang komprehensif-holistik-integratif tentang pokok-pokok bahasan dalam ilmu kalam yaitu: konsep manusia dalam islam, akal dan wahyu, takdir dan kebebasan

manusia, konsep etika, moral dan akhlak, konsep iman dan kufur serta sejarah munculnya aliran-aliran kalam dalam islam, sebab munculnya aliran-aliran tersebut, dan bagaimanakah konsep manusia, ketuhanan, akal dan wahyu, takdir dan kebebasan manusia serta konsep iman dan kufur di dalam aliran-aliran tersebut.

- Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengetahui serta mengevaluasi bermacam iddeologi dan pandangan dunia yang berkembang pada masa moderen dengan pemahaman yang baik dengan berdasar pada pemahaman dunia Islam sekitar permasalahan ketuhanan, kemanusiaan dan alam semesta.

3. Filsafat Pendidikan

Kompetensi dari mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki kemampuan mendeskripsikan dan menganalisa hakikat manusia, hakikat pendidikan, tujuan umum pendidikan dan paradigma pendidikan yang diwacanakan oleh para filosof, sehingga mahasiswa mampu memahami perbedaan pandangan para filosof tentang pendidikan, relevan dengan problem dan tantangan kontemporer yang dihadapi umat Islam, bangsa dan kemanusiaan global untuk keefektifan pemilikan pengetahuan tentang landasan, teori, dan metodologi dalam pendidikan Islam.

4. Sejarah Peradaban Islam (SPI)

Mata kuliah ini merupakan studi tentang sejarah masa Nabi, Sahabat, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan periode pertengahan termasuk memasuki periode moderen dan memasuki wilayah Indonesia. Dalam proses pembelajaran mata kuliah ini mahasiswa akan melakukan eksplorasi pemikiran dan analisa dalam menangkap makna-makna sejarah dalam perkembangan Islam. Mahasiswa diharapkan bisa mengembangkan kemampuannya dalam menganalisa sejarah perkembangan Islam baik dalam aspek pendidikan, politik, ekonomi dan sosial budaya dalam perspektif sejarah Islam, kemudian memilihnya, mengembangkannya, dan membandingkannya lalu mendiskusikan gagasan tersebut kemudian mengartikulasikan peristiwa itu sesuai dengan konten dan konteksnya pada

waktu itu. Dengan demikian mahasiswa akan dapat menemukan gagasan baru sesuai dengan konteks kekinian dan kedisinian.

5. Akhlak Tasawuf

Akhlak Tasawuf adalah mata kuliah yang bertujuan untuk mengenal lebih baik tentang keluhuran akhlak Nabi serta para ulama. Selain itu membuat orang-orang yang mempelajarinya berfikir serta mampu meneladani semua sifat dari akhlak mulia yang telah dicontohkan Nabi dan ulama terdahulu. Karena hasil yang ingin dicapai dari mata kuliah ini adalah memetakan dengan jelas mana perilaku akhlak Islami dan non-Islami, memahami dasar-dasar akhlak dalam Islam, memahami inti dan makna dari tiap perilaku yang Islami, memahami metode yang benar dalam memperoleh pengetahuan tentang akhlak Islami, memahami berbagai sarana yang dipergunakan oleh Nabi dan para ulama serta mengaplikasikan cara berfikir dan bertingkah laku secara Islami.

6. Hadis Tarbawi

Standar kompetensi dari mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki kemampuan memahami dan menghayati petunjuk-petunjuk Nabi yang berkaitan dengan beberapa aspek penting yang berhubungan dengan ketarbiyahan. Selanjutnya mahasiswa mampu mengimplikasikan pemahaman dan penghayatan tersebut ke dalam dunia pendidikan terutama dalam pengamalan baik dalam kapasitas mereka sebagai pribadi maupun makhluk sosial. Diantara materi yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah adab pergaulan antara anak dengan orang tua, adab pergaulan antara murid dengan guru, adab pergaulan dengan tetangga, dan keutamaan bersikap jujur dan sederhana serta etos kerja seorang muslim.

7. Strategi pembelajaran I

Dalam deskripsi mata kuliah ini dijelaskan bahwa globalisasi yang ditandai dengan kemajuan-kemajuan penting dalam teknologi informasi dan komunikasi, mendorong terjadinya pula perubahan-perubahan dalam pembelajaran. Dalam perspektif makro, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempercepat proses demokratisasi dan equity dalam

pembelajaran. Guru atau tenaga pengajar kini tidak lagi merupakan satu-satunya nara sumber dalam proses pembelajaran. Teknologi komunikasi dan informasi yang akan terus berkembang semakin menungkhkan peserta didik untuk mengakses sendiri beragam sumber belajar. Karena itu jika guru dan tenaga pengajar tetap ingin memainkan peran sentral dalam proses, mereka harus melakukan perubahan-perubahan atau sedikitnya paradigma, strategi, pendekatan dan tekhnolo pembelajaran. Di sampng itu yang juga tidak kalah penting untuk diperhatikan bagaimana cara atau strategi belajar yang humanis, partisipatoris dan memperhatikan keragaman anak didik dalam proses pembelajaran. Dalam konteks ini maka tekhnikal skill yang dibutuhkan adalah pemahaman yang baik dan menyeluruh terhadap strategi belajar mengajar

8. Metodologi Studi Islam (MSI)

Deskripsi mata kuliah ini menggambarkan bahwa mahasiswa akan memiliki landasan dan wawasan keilmuan studi Islam sehingga mahasiswa dapat memahami dan menghayati serta mengamalkan beberapa aspek penting sebagai patokan dalam kehidupan baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Melihat kenyataan pada era globalisasi dan informasi saat ini, yang ditandai dengan semakin menipis dan hilangnya batas pemisah antara nilai-nilai dan lingkungan budaya bagsa yang bersifat universal, tampaknya studi Islam menjadi sangat penting dan mendapatkan perhatian yang sangat luas. Urgensi studi Islam pada masa sekarang paling tidak dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Sisi internal dimaksudkan adalah nilai-nilai dan sistem budaya yang ada dalam lingkungan umat Islam itu sendiri, sedangkan sisi eksternal adalah nilai-nilai dan sistem budaya di luar lingkungan umat Islam. Diantara Materi perkuliahan adalah Islam dan kebudayaan Indonesia. Dalam topik ini mahasiswa dapat menjelaskan secara lisan dan tulisan tentang Islam dan kebudayaan Melayu, Islam dan kebudayaan Jawa, dan Islam dan kebudayaan lain di Nusantara.

9. Pendidikan Kewarganegaraan

Secara substantive dan pedagogis program civic education dirancang sebagai wahana pendidikan umum yang bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa agar dapat mengembangkan dirinya menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, bertanggungjawab dan berpradaban. Oleh karena itu dalam instrumen pendidikannya dikembangkan kecerdasan warganegara yang mencakup 3 hal yaitu : *civic knowledge* (Pengetahuan kewarganegaraan), *civic skill* (keterampilan kewarganegaraan), dan *civic participation* (partisipasi kewarganegaraan) melalui interaksi pembelajaran yang bersifat yang bersifat partisipatif. Demokrasi bukan sebuah wacana, pola pikir, atau perilaku politik yang dapat dibangun sekali. Jadi bukan pula barang instan. Demokrasi adalah proses yang masyarakat dan negara berperan di dalamnya untuk membangun. Adapun proses transisi demokrasi Indonesia melalui proses reformasi konstitusional yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar dan perangkat legal sistem politik. Pendidikan kewarganegaraan diperguruan tinggi pada dasarnya merupakan komponen utama pendidikan demokrasi yang sengaja dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dan secara berkesinambungan yang memusatkan perhatian pada pengkajian konsep dan proses demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani.

10. Hadis

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki landasan dan wawasan keilmuan yang berhubungan dengan hadis Nabi Muhammad yang diharapkan agar mahasiswa dapat memahami dan menghayati serta mengamalkan beberapa aspek penting sebagai patokan dalam kehidupan baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial yang berhubungan dengan keimanan, realisasi iman dalam kehidupan sosial, ikhlas beramal, tingkah laku terpuji, dosa-dosa besar, etos kerja, tanggung jawab kepemimpinan, persaudaraan, tata pergaulan, ajakan kepada kebaikan, kepedulian sosial dan peduli lingkungan.

11. Tafsir

Mata kuliah ini menekankan pada penelitian ayat-ayat sesuai tema yang dikaji dengan mengemukakan penjelasan ayatnya yang berkaitan dengan akidah, kemanusiaan, kealaman, konsep masyarakat madani dan kebangsaan, kerukunan hidup antar umat beragama, manusia dengan proses penciptaannya, ayat-ayat gender dan menegakkan keadilan.

12. Sosiologi Agama

Mata kuliah Sosiologi Agama adalah mata kuliah tentang agama dan masyarakat yang mencakup berbagai tema agama dalam perbincangan teoritis sosial klasik dan kontemporer, lokal, nasional, maupun global. Pendekatan yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah pendekatan teoritis dan analisis praksis kekinian tentang agama dan masyarakat. Mata kuliah ini diberikan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menerjemahkan program-program pendidikan agama Islam yang berbasis pada realitas masyarakat. Di samping mampu mengajarkan persoalan keislaman, sarjana PAI seyogyanya terasah dalam membaca, menganalisis, dan mengajukan solusi tentang permasalahan di masyarakat yang terkait dengan agama menggunakan perangkat kritis berbasis ilmu pengetahuan empiris. Sosiologi Agama di berikan agar mahasiswa mempunyai pemahaman tentang masyarakat dan agama yang saling terkait dan dapat menerjemahkannya dalam program atau aksi pendidikan dan pengajaran di masa yang akan datang. Di antara salah satu topik yang dibahas adalah sosiologi agama kontemporer yang mencakup makna agama dan sekuler, agama dan gender, agama dan HAM, radikalisme agama, agama dan aliran sempalan agama, Model kerukunan antar umat beragama di Indonesia, agama dan konflik sosial (dimensi empiris agama, perbedaan suku dan ras, perbedaan budaya, masalah mayoritas dan minoritas, konsumerisme, dan globalisasi.

13. Psikologi Pendidikan

Dalam standar kompetensi mata kuliah ini dijelaskan tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki wawasan dan landasan ilmu

kependidikan serta memiliki dasar pengetahuan psikologis sebagai pendukung dalam membantu proses pembelajaran, sehingga mampu mengaplikasikannya dalam proses mendidik secara universal dan proses belajar mengajar secara spesifik dalam bentuk teoritis-praktis. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang keharusan seorang pendidik yang profesional melaksanakan profesinya sesuai dengan keadaan peserta didik. Psikologi sebagai ilmu pengetahuan berupaya memahami keadaan dan perilaku manusia sebagai anak didik. Karena itu para pendidik diharapkan untuk memiliki pengetahuan psikologi pendidikan yang memadai ini tergambar dalam materi perkuliahan yang diberikan yaitu determinan proses perkembangan dan hubungannya dengan pendidikan dan pengajaran. Dalam materi ini dibahas perkembangan psiko-fisik siswa dan arti penting perkembangan kognitif bagi proses belajar siswa

14. Strategi Pembelajaran II

Mata kuliah ini mengkaji dan menganalisis hakikat dan makna strategi pembelajaran, mengidentifikasi berbagai upaya menata faktor eksternal agar tercipta pembelajaran yang efektif, efisien dan mencapai hasil belajar yang optimal. Menganalisis teksonomi variabel dalam pembelajaran (tujuan pembelajaran, dan karakteristik bidang studi, kendala, karakteristik peserta didik, strategi pengorganisasian pembelajaran, strategi penyampaian pembelajaran dan strategi pengelolaan pembelajaran). Mata kuliah ini juga memberikan pengetahuan tentang karakteristik internal peserta didik dan upaya pembelajaran yang didasarkan pada teori belajar, serta menganalisis kasus-kasus strategi pembelajaran di lapangan sebagai contoh evaluasi dalam melacak pemahaman mahasiswa tentang dimensi permasalahan pembelajaran di sekolah.

15. Sosiologi Pendidikan

Dalam deskripsi mata kuliah ini dijelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah agar mahasiswa memiliki landasan dan wawasan keilmuan tentang berbagai persoalan pendidikan dan menganalisisnya dari sudut

pandang sosiologis. Diantara materi yang dibahas adalah multikulturalisme, dan pendidikan multikultural

16. Bimbingan dan penyuluhan

Bimbingan dan penyuluhan adalah mata kuliah adalah mata kuliah terapan yang memberikan bekal kepada mahasiswa seperangkat kemampuan dasar BP sehingga dapat memahami dan membantu memberikan pelayanan terhadap individu yang bermasalah. Diantara kemampuan itu adalah menelaah atau menganalisa masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa serta punya kemampuan membantu memberikan jalan keluar atau layanan baik layanan konseling individual dan kelompok dan layanan lainnya. Kemudian kemampuan mengorganisir layanan dalam lembaga formal, kemampuan bekerjasama dengan komponen dan elemen sekolah baik itu kepada guru, wali kelas dan kepala sekolah, bahkan orang tua murid selain sebagai sumber data dan informasi juga sebagai komponen dalam pengembangan BP selanjutnya.

Dari semua penjelasan di atas, maka dapat dilihat bahwa tidak seluruh mata kuliah yang mengandung pendidikan multikulturalisme. Penulis di sini melihat dari deskripsi mata kuliah, standar kompetensi dan silabus yang menggambarkan materi-materi yang diberikan di setiap pertemuan. Standar kompetensi suatu mata kuliah merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan, keterampilan dan sikap positif terhadap perkuliahan yang diberikan.

Sedangkan silabus merupakan penjabaran dari standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran. Silabus kemudian dikembangkan oleh dosen dan disesuaikan dengan kebutuhan materi perkuliahan. Dalam pengembangan silabus ini kandungan pendidikan multikultural sudah terlihat. Untuk kurikulum prodi PAI FITK UIN Jakarta dari 57 (termasuk skripsi dan KKN) mata kuliah yang ditawarkan, terdapat sekitar 17 mata kuliah yang mengandung muatan pendidikan multikultural dan untuk kurikulum prodi PAI pada STAIN Manado dari 48 mata kuliah yang ditawarkan terdapat 16 mata kuliah yang mengandung pendidikan multikultural baik yang jelas secara

langsung menyebutkan materi pendidikan multikultural maupun yang berkaitan dengan materi pendidikan multikultural seperti HAM, Demokrasi, Islam dan gender, toleransi beragama, dan menghargai perbedaan pendapat dengan mengetahui perbedaan mazhab fikih atau kalam.

Dari analisa yang dilakukan menunjukkan pemahaman, penghargaan dan penghormatan terhadap sesuatu yang berbeda merupakan materi yang harus ada. Kompetensi pendidikan multikultural harus berorientasi kepada dua komponen yaitu penghargaan kepada orang lain dan penghargaan kepada diri sendiri. Mahasiswa diajarkan cara yang baik dalam memberikan pendapat dan tanggapan kepada orang lain. Hal ini seperti mata uang yang tidak terpisahkan. Mahasiswa diajarkan berani menanggapi apa yang dilihatnya dan memberikan kritik secara objektif. Memberikan tanggapan kepada orang lain yang berbeda pendapat dengan cara yang baik berarti mahasiswa sudah memahami cara menghargai orang lain dan tetap menjunjung tinggi perbedaan. Begitu juga dengan individu yang memberi kritik namun tetap objektif menunjukkan penghargaan mahasiswa terhadap dirinya dengan aktif mengikuti pembelajaran.

Untuk kasus Indonesia, baik kurikulum PAI FITK UIN maupun STAIN Manado, penyajian materi pendidikan multikultural terintegrasi pada mata kuliah-mata kuliah yang relevan, tidak diberikan dalam satu mata kuliah yang terpisah. Kurikulum pada ke dua perguruan tinggi ini memasukkan pendidikan multikultural pada kurikulum yang berorientasi kepada materi yang tujuan utamanya adalah memasukan materi pendidikan multikultural pada setiap mata kuliah yang relevan.

Pengembangan pendidikan multikultural dalam kurikulum haruslah mempertimbangkan kearifan lokal. Untuk Indonesia pendidikan multikultural memerlukan pedagogik baru. Untuk menerapkan konsep multikultural dalam masyarakat pluralistik, pedagogik yang tradisional tidak dapat digunakan lagi, karena pedagogik tradisional membatasi proses pendidikan di dalam ruangan sekolah yang sarat dengan pendidikan intelektualistik. Sedangkan kehidupan sosial budaya di Indonesia menuntut pendidikan hati yang diarahkan kepada rasa persatuan dari bangsa Indonesia yang pluralistik. Pedagogik baru yang dibutuhkan

adalah pedagogik pemberdayaan dan pedagogik kesetaraan sesama manusia dalam kebudayaan yang beragam sehingga diharapkan mahasiswa agar bisa selalu berperilaku humanis, pluralis dan demokratis.

Wacana pluralis multikulturalis perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Pengalaman pendidikan era orde baru menjadi bahan refleksi atas persoalan yang menimpa pendidikan Indonesia. Pola penyeragaman yang tidak menghargai kenyataan pluralitas atau multikulturalitas menjadi pemicu lahirnya beragam persoalan sosial. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, maka kurikulum yang ideal adalah kurikulum yang dapat menunjang proses peserta didik menjadi manusia demokratis, pluralis dan menekankan penghayatan hidup serta refleksi untuk menjadi manusia yang utuh yaitu generasi muda yang tidak hanya pandai, tetapi juga bermoral dan etis, dapat hidup dalam suasana demokratis dan menghormati hak orang lain.

Pendidikan multikultural yang harus banyak mendapat porsi di setiap mata kuliah yang relevan adalah agama. Agama merupakan isu yang paling sensitif dalam wacana dan gerakan multikulturalisme di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar problem multikulturalisme di Indonesia pada isu agama. Keyakinan teologis dan ideologi agama merupakan sumber kebudayaan yang berpengaruh kuat terhadap pola interaksi antar kelompok masyarakat. Kuatnya keyakinan dalam membentuk kepribadian, cara pandang ideologi manusia yang merefleksi dalam bentuk sikap dan perilaku dalam banyak hal dapat melebihi kekuatan pengaruh kebudayaan lain.

Atas dasar keyakinan atau agama seseorang siap melakukan bunuh diri, membunuh dan ikut berperang. Slogan “jihad” cukup efektif untuk menggerakkan seorang pemeluk agama Islam atas nama agamanya untuk berperang melawan kekafiran atau melakukan pengorbanan secara sungguh-sungguh demi tegaknya agama Islam dengan cara apapun.

Sensitivisme agama menyangkut eksklusivisme – inklusivisme dalam pemahaman agama para pemeluknya. Pelabelan terhadap pemeluk agama menjadi eksklusif dan inklusif, telah menimbulkan dampak negatif karena hal itu seolah-olah mengabsahkan fragmentasi kelompok masyarakat berdasarkan perbedaan

corak pemahaman keagamaan. Ketika agama dan pemeluk agama sudah dikelompokkan sedemikian rupa melalui label-label yang diterapkan kepada mereka hal itu dengan sendirinya akan mempertajam *ingroup* – *outgroup* kelompok satu agama. Orang yang tidak sama berarti orang luar dan tidak masuk ke dalam kelompok lingkungan kelompoknya. Bahkan internal kelompok umat Islam saja telah saling mencaci, misalnya konflik FPI dengan AKKBP adalah peristiwa ironis yang sangat memprihatinkan. Di sini sulit dicari siapa membela siapa dan melawan siapa.

Oleh karena itu kerukunan antar dan inter umat beragama harus mendapat porsi yang besar dalam pengembangan kurikulum di prodi PAI FITK UIN Jakarta dan prodi PAI STAIN Manado. Walaupun materi ini sudah ada dalam silabus mata kuliah, tetapi persentasinya masih berimbang dengan materi lain seperti HAM, demokrasi, gender, perkawinan, waris, akidah, akhlak dan lain sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa konsep pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal pada prodi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta dan Prodi PAI pada Jurusan Tarbiyah STAIN Manado adalah terintegrasi pada mata kuliah-mata kuliah, tidak diberikan dalam satu mata kuliah yang terpisah. Kurikulum pada ke dua perguruan tinggi ini memasukkan pendidikan multikultural pada kurikulum yang berorientasi kepada materi yang tujuan utamanya adalah memasukkan materi pendidikan multikultural pada setiap mata kuliah yang relevan.

Pendidikan multikultural yang harus banyak mendapat porsi di setiap mata kuliah yang relevan adalah agama. Agama merupakan isu yang paling sensitif dalam wacana dan gerakan multikulturalisme di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar problem multukulturalisme di Indonesia pada isu agama.

Pengembangan pendidikan multikultural dalam kurikulum haruslah mempertimbangkan kearifan lokal. Untuk Indonesia pendidikan multikultural memerlukan pedagogik baru. Untuk menerapkan konsep multikultural dalam masyarakat pluralistik, pedagogik yang tradisional tidak dapat digunakan lagi, karena pedagogik tradisional membatasi proses pendidikan di dalam ruangan sekolah yang sarat dengan pendidikan intelektualistik. Sedangkan kehidupan sosial budaya di Indonesia menuntut pendidikan hati yang diarahkan kepada rasa persatuan dari bangsa Indonesia yang pluralistik. Pedagogik baru yang dibutuhkan adalah pedagogik pemberdayaan dan pedagogik kesetaraan sesama manusia dalam kebudayaan yang beragam sehingga diharapkan mahasiswa agar bisa selalu berperilaku humanis, pluralis dan demokratis.

B. Rekomendasi

Sebagai implikasi dari temuan-temuan dan kesimpulan penelitian ini, beberapa saran atau rekomendasi diajukan sebagai berikut:

1. Pendidikan multikultural dapat diterapkan sebagai sebuah program pembelajaran atau mata kuliah tersendiri. Jika hal ini dilakukan, ia dapat dirumuskan sebagaimana lazimnya dalam sebuah program mata kuliah. Pendidikan multikultural sebagai mata kuliah tersendiri berarti menambah beban kredit mata kuliah bagi mahasiswa. Akan tetapi jika dilihat substansi dan tujuan utamanya, pendidikan multikultural lebih tepat jika menjadi bagian inheren dari setiap mata kuliah yang ada pada setiap program studi. Format seperti ini menuntut adanya rekonstruksi paradigmatis, metodologi dan pendekatan pembelajaran bagi setiap mata kuliah. Dalam hal ini dosen dituntut untuk menggunakan paradigma dan metodologi pembelajaran yang memperhatikan berbagai aspek multikultural dalam proses pembelajaran.
2. Meski tidak harus menjadi mata kuliah, semangat pendidikan multikulturalisme sudah terkandung dalam UU Sisdiknas tahun 2003 sebagai acuan secara konstitusional penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Konsekuensinya, penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan semangat dan pesan multikulturalisme dalam UU tersebut. Dan hal ini harus tercermin dalam setiap mata pelajaran atau mata kuliah yang disajikan pada setiap lembaga pendidikan, apakah sebagai bagian dari materi pembelajaran, atau sebagai pendekatan atau metode pembelajaran.
3. Di dunia pendidikan, isu-isu agama dan multikulturalisme harus disikapi dan diajarkan secara hati-hati dan bijak agar tidak terjebak kepada dikotomi Islam pluralis- Islam Fundamentalis atau Islam eksklusif – Islam inklusif. Munculnya dikotomi seperti di atas semakin menegaskan adanya friksi di kalangan internal umat Islam yang hanya akan melemahkan semangat dialogis di antara mereka. Penyikapian dan pemihakan secara apriori terhadap salah satunya juga akan melemahkan gairah intelektual di kalangan umat Islam karena menutup peluang terjadinya dialog intelektual di kalangan mereka.

4. Ajaran Islam memiliki konsep yang jelas tentang multikulturalisme di dalamnya diungkapkan lingkup toleransi dan apresiasi terhadap realitas multikultur dan bagaimana menerapkan konsep multikulturalisme dan pendidikan multikultural yang berbasis ajaran Islam secara proporsional. Pernyataan-pernyataan tekstual dalam sumber hukum Islam tentang hal ini sudah sangat jelas. Tinggal bagaimana pernyataan-pernyataan tersebut dikemas dalam suatu materi dari setiap mata kuliah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, "Kebebasan Beragama atau Dialog Antaragama: 50 Tahun Hak Asasi Manusia." dalam J.B.Banawiratma, SJ, dkk, *Hak Asasi Manusia: Tantangan Bagi Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1999
- Achmad, Nur, (ed), *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2001
- Ali Imron, *Kearifan Lokal Hubungan Antar Umat Beragama di Kota Semarang*, Riptek Vol.5 No.1 Tahun 2011
- Amirin, Tatang M., *Implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Konteksual Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia*, dalam *Jurnal Pembangunan Pendidikan : Fondasi dan Aplikasi* di akses tanggal 28 September 2014
- Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, *Peranan Kerukunan Umat Beragama Dalam Memelihara dan Memantapkan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tabanan*, Makalah di akses tanggal 23 Juli 2013
- Anwar, M. Syafi'i, "Sikap Positif Kepada Ahli Kitab", *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 4 Vol. IV tahun 1993
- Arfhan, Imron, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, alang : Kalimasada Press, 1996
- Asy'arie, Musa, "Islam Pluralitas dan Indonesia Baru" dalam Th. Sumartana dkk, *Pluralisme, konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Institut DIAN, 2001
- Azra, Azyumardi, "Metodologi Pembuatan fatwa MUI Harus Ditinjau" dalam *Tempo Interaktif*, 02 Agustus 2005
- Bogdan, R. dan Biklen, S.K. *Qualitatif Research for Education: an Introduction to Theory and Method*. Boston: Allyn and Bacon, 1982
- Al-Bukhâri, Muḥammad ibn Ismail, *Shâhih al-Bukhâri*, Beirut: Alam al-Kutub, 1986
- Diansyah, Muhammad (-) dalam ketagori Bidang Harmonisasi Umat Beragama tanggal 14 Mei 2012
- Esack, Farid, *Qur'an Liberation and Pluralism*, Oxford: Oneworld Publications, 1997
- Esposito, John L., *Islam The Straight Path*, New York: Oxford University Press, 1988
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/ MUNAS VII/ MUI/II/2005
- Ferimeldi, *Kemenag Gelar Pelatihan Manajemen Konflik FKUB*, Dalam *Tribun Manado*, Tanggal 9 April 2012

- Haekal, Muhammad Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2001
- Hanafi, bnu Abil Izza al-, *Syarah al-Thahawiyah*, Mesir: *Dārul Ma'arif*, 1957
- Harun, Abd al-Salâm, *Tahdzîb Sirah Ibnu Hisyâm*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Hidayat, Komaruddin, *Tragedi Raja Midas, Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1998
- Hitti, Philip K., *Dunia Arab*, terj. Usuludin Hutagalung dan O.D. P Sihombing, Bandung: Sumur Bandung, t.th
- Husaini, Adian, *Pluralisme Agama: Haram Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2005
- Ibn Sa'ad, *Al-Thabaqât al-Kubra*, Bairut: Dar al-Shadr, 1960
- Imarah, Muhammad, *Islam dan Pluralitas: Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattanie, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Imron, Ali, *Kearifan Lokal Hubungan Antar Umat Beragama di Kota Semarang*, Riptek Vol.5 No.1 Tahun 2011
- JB. Banawiratma, S.J. (ed.), *Gereja Indonesia, Quo Vadis?: Hidup Menggereja Kontekstual*, Yogyakarta: Kanisius, 2000
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, *Profil Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Utara*
- Kompas*, "Fatwa MUI Memicu Kontroversi", 30 Juli 2005
- Kusmarni, Yani, *Pendidikan Multikultural, Suatu Kajian Tentang Pendidikan Alternatif di Indonesia Untuk Merekatkan Kembali Nilai-Nilai Persatuan, Kesatuan, dan Berbangsa di Era Global* dalam <http://www.kompas.com>. Diakses tanggal 28 September 2014
- Kustini (ed), *Peranan Kerukunan Umat Beragama Dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*, Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010
- Laporan Komisi Pemerintahan Global, *Kerukunan Dunia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997
- Laporan Workshop Kurikulum berbasis KKNi FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Juli 2014
- Laporan Workshop Review Kurikulum Prodi PAI Oktober 2014
- Lasut, Billy J., Manadonyaman.wordpress, tanggal 22 Desember 2012
- Lumowa, Fernando, *Tribun Manado*, 29 April 2012
- Madjid, Nurcholis, "Menuju Masyarakat Madani", *Ulumul Qur'an*, No. 2/VII/1996

- , *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan*, Jakarta: paramadina, 1992
- , *Masyarakat Religius, Membumikan Nilai-nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Paramadina, 2000
- Marasabessy, Abd.Rahman I, *Pluralisme Agama Perspektif al-Qur'an*, Disertasi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2005
- Masykur, *Pola Komunikasi Antar Umat Beragama, Studi atas`Dialog Umat Islam dan Kristen di Kota Cilegon Banten*, Article Annual Conference on Contemporary Islamic Studies. Diakses tanggal 2 Juni 2013.
- Mudzhar, Atho, "Kebijakan Negara dan Pemberdayaan Lembaga dan Pimpinan Agama dalam Rangka Keharmonisan Hubungan antar Umat Beragama" dalam Muhaimin AG (ed), *Damai di Dunia Damai Untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2004
- Mufid, A. Syafi'i (ed), *Beragama Di Abad Dua Satu*, Jakarta: CV Zikrul Hakim, 1997
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1998
- Musdah Mulia, *Pendidikan Multikulturalisme dalam wacana-pendidikan-multikultural-di-Indonesia*. Diakses tanggal 28 September 2014
- Nasution, Harun, *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI-Press, 1985
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994
- Pedoman Akademik Program Strata I 2013/2014 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006
- Purwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1969
- Rahardjo, Dawam, "Kala MUI Mengharamkan Pluralisme", kolom M. Dawam Rahardjo, dalam *Tempo Interaktif*, 01 Agustus 2005
- Rahman, Fazlur, *Islam, New York: Anchor Books*, 1979
- Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2010-2015
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- S.A Kamal, *Religion in A Pluralistic Society*, Leiden: E.J Brill, 1976
- Sachedina, Abdulaziz, *The Islam Roots of Democratic Pluralism*, New York: Oxford University Press, 2001
- Sambutan Menteri Agama RI, pada acara pembukaan Rakornas II FKUB Tahun 2010 di Hotel Sahid Jakarta tanggal 25 Mei 2010

Shihab, Alwi, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 2001

Sirri, Mun'im, A. (ed), *Fiqih Lintas Agama*, Jakarta: Paramadina, 2004

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1991

STATUTA STAIN Manado 2012

Truna, Dody S. *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme: Telaah Kritis atas Muatan Pendidikan Multikulturalisme dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010

Wisnumurti, Anak Agung Gede Oka, *Peranan Kerukunan Umat Beragama Dalam Memelihara dan Memantapkan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tabanan*, Makalah di akses tanggal 23 Juli 2013